

**PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PPKn
SMP NEGERI 13 MAKASSAR**

TESIS

SIRAJUDDIN EMBA
NIM. 4617103011



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Sabtu, 13 Juli 2019

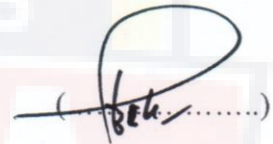
Tesis Atas Nama : Sirajuddin Emba

NIM : 4617103011

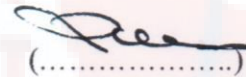
Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada program Studi Ilmu Administrasi Negara

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr Syamsul Bahri.S.Sos.,M,Si



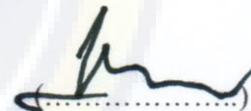
Sekretaris : Dr.Dra.Hj Juharni.,M,Si



Anggota Penguji 1. Prof.Dr.H.Andi Rasyid Pananrangi,SH.,M.Pd



2. Prof.Dr. Imran Ismail.,M.Si



Makassar 13 Juli 2019

Direktur



Prof. Dr. I. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN : 0913017402

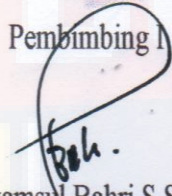


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Penguatan Kebijakan Pembelajaran PPKn SMP Negeri 13 Makassar
2. Nama : Sirajuddin Emba
NIM : 4617103011
3. Program : Ilmu Administrasi Negara

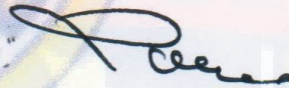
Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si
NIDN : 0015016704

Pembimbing II



Dr. Dra. Hj Juharni, M.Si
NIDN : 0907076701

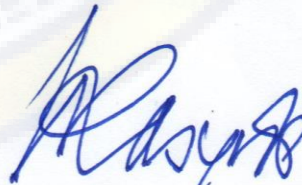
Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN : 0913017402

Ketua Program Studi Administrasi Negara



Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd
NIP. 19560110 198303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

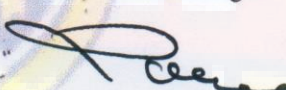
1. Judul : Penguatan Kebijakan Pembelajaran PPKn SMP Negeri 13 Makassar
2. Nama : Sirajuddin Emba
- NIM : 4617103011
3. Program : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si
NIDN : 0015016704

Pembimbing II

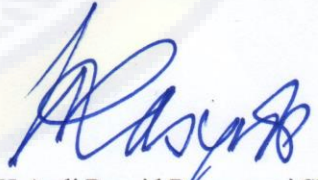

Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si
NIDN : 0907076701

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si
NIDN : 0913017402

Ketua Program Studi Administrasi Negara


Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd
NIP. 19560110 198303 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi , dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali secara yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, .pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)



Makassar 13 Juli 2019

Sirajuddin Emba

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang dimana tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan di Program Pascasarjana fakultas ilmu administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Prof Dr.Ir. H. Muh saleh Pallu,M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermamfaat kepada penulis selama kuliah di Univerrstas Bosowa Makassar.
2. Prof .Dr. Batara Surya, S.T.,M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana di Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermamfaat kepada penulis selama kuliah di Univerrstas Bosowa Makassar.
3. Prof .Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH., M.Pd, selaku Ketua Prodi Studi Administrasi Negara Pascasarjana di Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermamfaat kepada penulis selama kuliah di Univerrstas Bosowa Makassar.
4. Dr Syamsul Bahri,S.Sos., M.Si, selaku Asisten Direktur Pascasarjana di Universitas Bosowa Makassar dan juga selaku dosen pembimbing I yang

telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermamfaat kepada penulis tentang penulisan dan penyusunan tesis yang kami susun.

5. Dr Hj Juharni.,M.SI, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermamfaat kepada penulis tentang penulisan dan penyusunan tesis yang kami susun.
6. Para dosen Universitas Bososwa Makassar, telah membimbing dan memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermamfaat bagi kami sebagai penulis
7. Kepala Sekolah SMP Negeri 13 yang telah memberikan waktu dan ruang kepada penulis dalam hal memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
8. Guru mata pelajaran PPKn SMP Negeri 13 yang telah memberikan waktu dan ruang kepada penulis dalam hal memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
9. Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 13 yang telah memberikan waktu dan ruang kepada penulis dalam hal memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
10. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan banyak semangat dan spirit dan dukungan moril dalam rangka penyusunan tesis ini.
11. Semuan teman-teman mahasiswa Pascasarjana sepekuliahan program studi administrasi yang tidak dapat penuliskan sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan yang selalu menghadapi tantangan zaman yang berubah seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Makasar, 13 Juli 2019

Penulis

BOSOWA

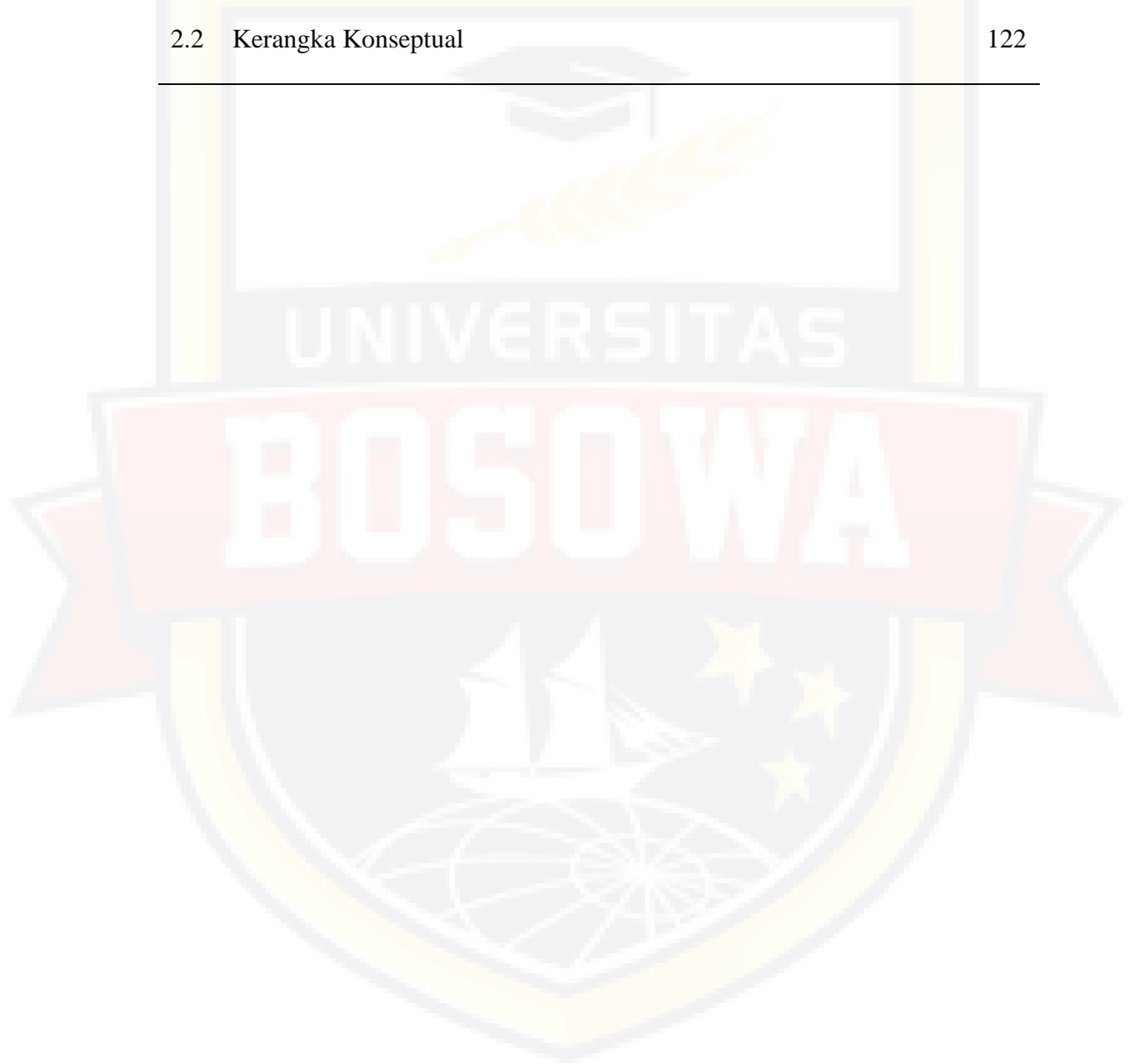


DAFTAR TABEL

Tabel dan Grafik	Jenis Tabel	Halaman
2.1	Tipe Tipe Evaluasi	91
3.1	Operasionalisasi Konsep	133
4.1	Gambaran umum Tentang Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik SMP Negeri 13 Makassar	137
4.2.	Guru dan Tenaga kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian	138
4.3	Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Golongan	139
4.4	Peserta didik Berdasarkan Tingkatan ,Agama, Umur dan Jenis Kelamin	139
4.5	Berdasarkan Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 13 Makassar	140
4.6	Daftar Prestasi Peserta Didik SMP Negeri 13 Makassar	157

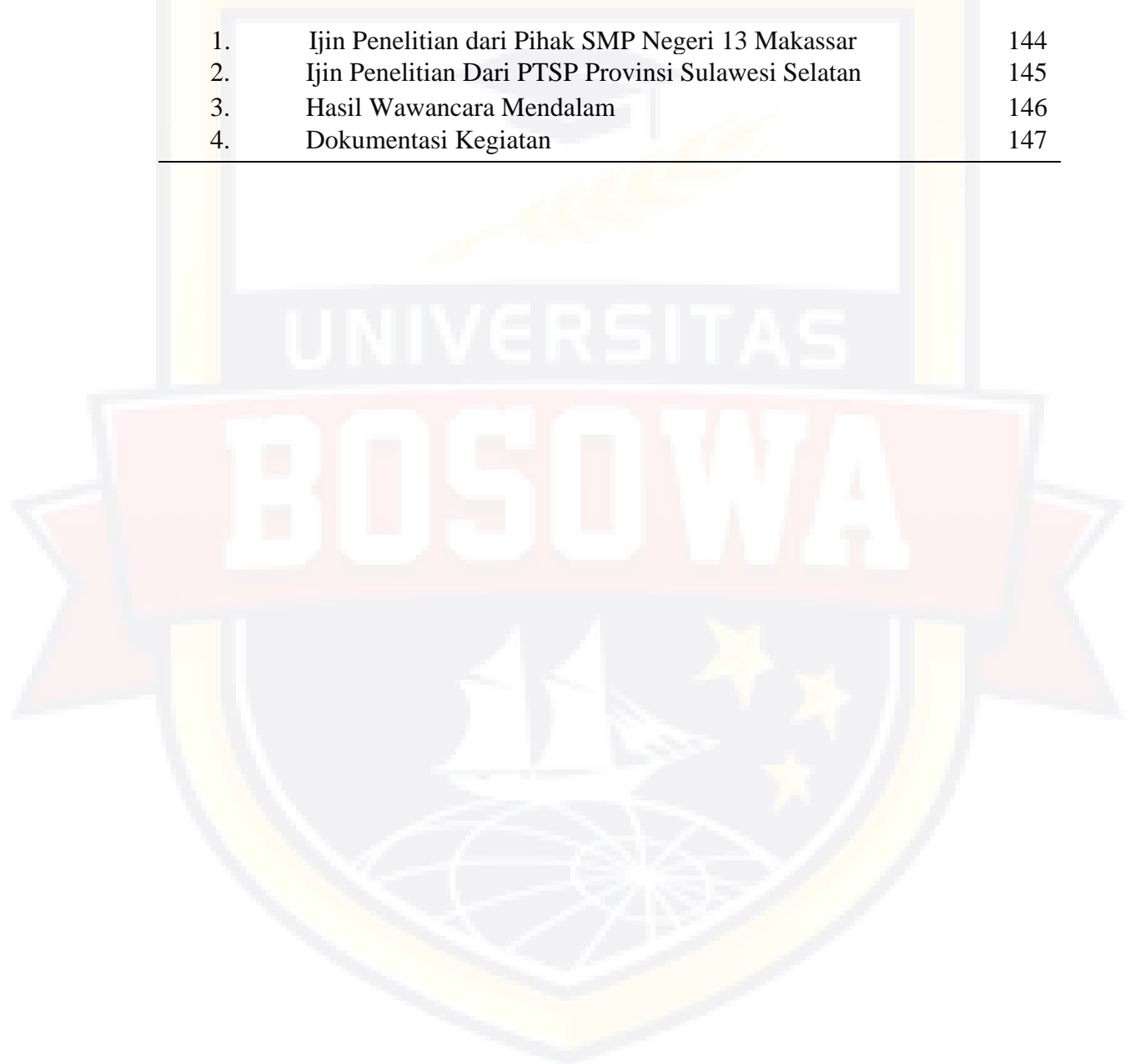
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Jenis Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Konseptual	122



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Ijin Penelitian dari Pihak SMP Negeri 13 Makassar	144
2.	Ijin Penelitian Dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan	145
3.	Hasil Wawancara Mendalam	146
4.	Dokumentasi Kegiatan	147



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, di era globalisasi, dimana terjadi pula persaingan ideologi dalam kehidupan antar bangsa, masalah krisis identitas nasional menjadi masalah yang krusial. Betapa tidak, banyak kalangan anggota masyarakat dewasa ini dinilai tidak lagi mencerminkan komitmennya yang kuat dalam mengamalkan secara kontekstual nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Tidak kuatnya komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini ditengarai tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat luas. Di kalangan elit politik dan pemimpin bangsa pun diduga telah mengalami kemunduran dalam komitmen ini (Kaelan, 2003).

Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini terjadi kecenderungan banyak kalangan di masyarakat yang tidak lagi memahami kedudukan, fungsi, dan makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, di kalangan generasi muda mahasiswa, dalam suatu wawancara oleh reporter stasiun TV menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang tidak mengetahui lagi bahwa Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia.

Mereka juga tidak mengenal lagi pengertian, makna, unsur-unsur, dan nilai-nilai Pancasila dalam susunan dan kedudukan serta fungsinya yang benar. Tanpa disadari kemudian masuklah berbagai pengaruh ideologi dan nilai-nilai asing dalam kehidupan masyarakat, seperti masuknya pengaruh nilai-nilai dari gerakan kaum fundamentalisme agama yang keras, *radikal* pengaruh nilai-nilai dari gerakan asertivitas etnis yang kuat, nilai-nilai *primordialisme* kesukuan dan kepentingan kelompok yang kuat, dan pengaruh ideologi *neoliberalisme* dengan seperangkat nilai-nilainya seperti *individualisme*, *materialisme*, *sekulerisme*, *hedonisme*, *rasionalisme*, *materialisme*, budaya *konsumerisme* yang tinggi, dan pengaruh budaya pasar dengan nilai-nilai kapitalismenya. Pengaruh berbagai *ideologi* dengan nilai-nilainya yang makin mendominasi karakteristik kehidupan bermasyarakat dan ber- bangsa inilah yang kian dirasakan menimbulkan krisis identitas nasional ini (Atmadja, 2008; Piliang, 1998; As'ad Said Ali, 2010).

Fenomena ini terjadi tidak bisa dilepaskan dari proses reformasi yang terjadi di Indonesia, pengaruh globalisasi, dan penerapan prinsip demokrasi yang salah arah karena belum atau tidak kuatnya keyakinan terhadap jati diri atau identitas kultural bangsa yang sesungguhnya merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, lemahnya keyakinan pada komitmen identitas kultural masyarakat Indonesia menyebabkan proses sosialisasi dan proses pendidikan nilai-nilai Pancasila juga mengalami kelemahan.

Pancasila pada hakekatnya merupakan sistem nilai (*Value Sistem*) yang merupakan *kristalisasi* dari nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia,

yang berakar dari unsur-unsur kebudayaan secara keseluruhan terpadu menjadi kebudayaan bangsa indonesia. Proses terjadinya pancasila melalui suatu proses yang disebut kausa *materialism* karena nilai-nilai pancasila sudah ada dan merupakan suatu realita yang hidup sejak jaman dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. pandangan yang diyakini kebenarannya itulah yang menimbulkan tekad bangsa indonesia untuk mewujudkannya dalam sikap dan tingkah laku serta perbuatannya (kaelan, 2007:13). kehidupan bangsa indonesia memerlukan adanya implementasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila, agar nilai norma dan etika yang terkandung di dalam pancasila benar-benar menjadi bagian yang utuh dan dapat menyatu dengan kepribadian setiap manusia indonesia, sehingga dapat membentuk pola sikap, pola pikir dan pola tindak serta memberi arah kepada manusia indonesia.

Menurut notonagoro dalam buku (sunoto, 1991:50) berpendapat bahwa pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pandangan hidup dan menjadi alat pemersatu bangsa. nilai yang tertera pada lima sila tersebut merupakan ideologi yang digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat indonesia. lima dasar utama pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia,

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

kelima sila tersebut bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti yang sangat luas dalam kehidupan bernegara. Dalam TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 ini terdapat 45 butir pengamalan nilai-nilai Pancasila yang telah diubah dari 36 butir yang terdapat dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 yang sudah tidak berlaku lagi setelah dikeluarkannya ketentuan yang baru.

Fungsi pemerintah sebagai kekuasaan eksekutif yang melaksanakan kebijakan publik dalam hal ini sangat berperang besar dalam melakukan penguatan terhadap ideologi bangsa dan negara baik berupa kebijakan kebijakan maupun berupa upaya upaya dalam hal penanganan dan perwujudan NKRI. Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Dye (1978) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*whatever governments choose to do or not to do.*", yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan.

Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah

Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dalam lampirannya menjelaskan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter. selain itu, pasal 37 undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang penting dan tidak bisa diremehkan.

Selama ini metode pembelajaran pendidikan kewarganegaraan masih bersifat sentralistik sehingga guru kurang melibatkan siswa secara aktif, seperti yang dikemukakan Numan Somantri (2001:304) bahwa para guru PPKn masih menggunakan cara tradisional yaitu ceramah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila adalah dengan menerapkan pendidikan Pancasila atau yang saat ini sering disebut dengan pendidikan

pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). Pendidikan pancasila adalah salah satu materi pelajaran moral yang ada di setiap bangku pendidikan. pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai pancasila atau budaya bangsa indonesia seperti yang tertuang dalam kurikulum pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. definisi lain tentang nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas terhadap suatu kualitas yang menyangkut jenis dan minat. nilai juga merupakan suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia, karena suatu itu berguna, keyakinan, memuaskan, menarik, menguntungkan dan menyenangkan (Winarno, 2007:3). Muatan pancasila pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) yang sekarang ini hanya sebagai sisipan saja. pancasila tidak dijadikan sebagai muatan utama. padahal sejatinya pancasila yang notabene dijadikan sebagai dasar negara harusnya menjadi muatan inti mata pelajaran PPKn di persekolahan agar peserta didik yang merupakan warga negara muda memahami hakekat pancasila dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. mata pelajaran ppkn sangat esensial diberikan di persekolahan di negara kita sebagai wahana untuk membentuk warga negara cerdas, terampil dan berkarakter (*National Character Building*) yang setia dan memiliki komitmen kepada bangsa dan negara Indonesia yang majemuk.

Dalam kaitannya dengan pembentukan *Intellectual Citizenship*, faktor guru sangatlah menentukan. Posisi dan peran guru sebagaimana ditegaskan oleh Roestiyah (2001: 123) “tidak semata-mata transfer of knowledge, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer of value dan sekaligus pembimbing yang mengarahkan dan menuntun siswa dalam belajar”. Dari pernyataan di atas, ternyata keberhasilan dalam proses pembelajaran tidak hanya diukur dari meningkatnya pengetahuan anak, tetapi juga harus meningkat pemahamannya terhadap nilai-nilai moral dan nilai-nilai demokratis yang merupakan bagian dari pembentukan *Intellectual Citizenship*.

Keadaan yang demikian ini menuntut guru untuk dapat meningkatkan kualitas mengajarnya melalui berbagai macam kegiatan konstruktif sehingga dapat memaksimalkan hasil pembelajaran yang mengarah pada pembentukan *intellectual citizenship*. Kenyataan di lapangan masih banyak guru yang kurang pemahamannya akan konsep demokrasi dan juga mengabaikan kewajiban profesi yang harus selalu menyesuaikan diri dan kemampuannya seiring dengan perkembangan IPTEK.

Pendidikan karakter sesungguhnya bukan sekedar berurusan dengan proses pendidikan tunas muda yang sedang mengenyam masa pembentukan di dalam sekolah, melainkan juga setiap individu didalam lembaga

pendidikan, sebab pada dasarnya untuk menjadi individu yang bertanggung jawab didalam masyarakat, maka setiap individu mestinya mengembangkan berbagai macam potensi dalam dirinya, termasuk guru sehingga dalam penelitian ini, selain siswa, faktor utama dalam hal penanaman nilai-nilai karakter bangsa adalah guru, artinya guru yang paling utama terlebih dahulu harus memiliki karakter tersebut.

Selama ini, di tingkat SMP terkhusus di SMP Negeri 13 Makassar pembelajaran pendidikan pancasila sebagai wahana pendidikan karakter bangsa disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan yang sarat dengan muatan materi. ini ditengarai karena ia kurang menunjukkan peranannya sebagai pendidikan ideologi, nilai-nilai, dan pendidikan moral, melainkan lebih menunjukkan fungsinya sebagai pendidikan akademis yang secara kultural justru menanamkan nilai-nilai rasional yang sekuler dan kapitalis. lihat saja ujungnya pada pengambilan keputusan nilai-nilai dan kebijakan pembangunan yang lebih dominan dilandasi oleh nilai-nilai ekonomis, kekuasaan, dan *hedonisme materialistik*. (Sukadi, 2007a, 2007b; Rindjin, 2009; Kaelan 2003; As'ad Said Ali, 2010).

Masalahnya, seberapa efektif dan berkualitaskah pelaksanaan program pendidikan pancasila dijalankan dalam visinya sebagai wahana pendidikan karakter bangsa (dalam perspektif pendidikan ideologi bangsa dan negara, pendidikan nilai dan moral, serta pendidikan budi pekerti yang berbasis pancasila) yang memiliki misi baik secara *sosiopaedagogis*, *sosioakademis*, *sosioakademis*, *sosioakademis*, maupun dalam menjalankan misi pendidikan demokrasi

(Winataputra, 2001). Demikian pula seberapa kuatkah program pendidikan pancasila memberikan landasan upaya pengembangan diri pada mahasiswa untuk secara kontinu memahami dan meluaskan cakrawala pengetahuan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai pancasila secara aktif dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. mengingat lemahnya keteladanan para model dan figur *publik* di negeri ini dalam membela dan mengaplikasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai pancasila secara utuh dan *komprensif*, maka wajarlah jika dalam banyak diskusi di kelas para mahasiswa meragukan bahwa ideologi Pancasila dapat terapkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Akankah pandangan-pandangan yang seakan-akan demokratis seperti ini berlangsung terus dalam kehidupan generasi muda kita, betapa memprihatinkan kondisi karakter anak bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembelajaran PPKn dimana implementasi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya berlangsung dalam pembelajaran di dalam kelas, melainkan pula melalui pendidikan secara luas. diharapkan dengan mempelajari PPKn siswa menjadi berpikir kritis, *rasional*, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan dan dapat bertanggungjawab dalam tindakannya sehingga diharapkan tidak terjadi salah mengartikan kata demokrasi yang seharusnya tetap pada kaidah-kaidah hukum norma yang ada untuk tetap menghargai dan menghormati kewajiban dan hak orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian mengenai penguatan kebijakan pembelajaran PPKn untuk meningkatkan sikap demokratis siswa pada mata pelajaran PPKn sangatlah penting dan tepat, karena pendidikan pancasila memiliki tujuan dan program yang sejalan dengan upaya pembentukan manusia dan warga negara indonesia yang berkarakter dan demokratis.

1. Fokus Penelitian

1. Guru –guru SMP Negeri 13 Makassar
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi respon siswa/siswi pada pembelajaran PPKn SMP Negeri 13 Makassar
3. Siswa/siswi SMP Negeri 13 Makassar

2. Batasan Masalah

dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi permasalahannya pada penguatan kebijakan pembelajaran PPKn SMP Negeri 13 Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian difokuskan kepada permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana respon siswa siswa/siswi SMP Negeri 13 Makassar terhadap pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn)?
2. Bagaimana penguatan kebijakan program pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) pada SMP Negeri 13 Makassar ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana respon siswa/siswi terhadap mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai pancasila dan ideologi bangsa.
2. Untuk mengetahui bagaimana penguatan kebijakan, program, strategi dan bentuk pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan ideologi pancasila pada sekolah menengah pertama sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan karakter bangsa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi siswa adalah :
 - a. Memiliki kemampuan memahami dan menjelaskan konsep dan nilai dalam materi kewarganegaraan (ranah *kognitif*)
 - b. Meningkatkan kemampuan emosional (ranah *afektif*)
 - c. Meningkatkan keterampilan berwarganegara dan berdemokrasi (ranah *psikomotorik*)
2. Bagi guru adalah :
 - a. Meningkatkan kemampuan dan kemauan guru dalam menggunakan berbagai model pembelajaran
 - b. Meningkatkan kemampuan guru dalam penyajian materi pelajaran sesuai dengan prinsip metodologis mengajar PPKn.

- c. Memaksimalkan tujuan pembelajaran ranah terpadu dalam mata pelajaran PPKn.

E. Lingkup Penelitian

1. Lingkup Ilmu dan Materi Penelitian

Ruang lingkup materi penelitian adalah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang menyangkut kebijakan pembelajaran pkn menerapkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembentukan sikap demokratis siswa serta pengalaman dalam nilai – nilai pancasila.

2. Ruang Lingkup Variabel Yang Diteliti

- a. Guru - guru mata pelajaran PPKn SMP NEGERI 13 Makassar dan guru guru yang terkait.
- b. Siswa/siswi SMP NEGERI 13 Makassar tahun pelajaran 2018/2019.

3. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah penguatan kebijakan terhadap pada mata pelajaran PPKn kelas VII SMP Negeri 13 tahun pelajaran 2018/2019.

4. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 13 tahun pelajaran 2018/2019.

5. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu penelitian adalah sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan, sampai penyelesaian penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara jelas menggambarkan isi, dan apa yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II. Kajian Teori dan Kerangka Konseptual

Dalam bab ini memuat uraian tentang perspektif teori yang di gunakan dalam penelitian ini sehingga kelihatan referensi keilmuan apa yang di gunakan dan juga memuat tentang kerangka konsep yang di gunakan dalam penelitian sehingga jelas variabel – variabel yang akan di teliti.

3. Bab III. Metode Penelitian

dalam bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, Fokus dan deskripsi fokus, sampel data penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data dan operasional konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian, Temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian.

5. Bab V. Penutup

Pada Bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran yang di mana pada kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga termuat Saran-saran yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, saran – saran berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu :

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang - bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian yang sifatnya membangun.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Perspektif Teori

A.1. Tinjauan Tentang Kebijakan

1. Konsep kebijakan Publik

Secara *epistimologi* istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan diartikan sama dengan keputusan. Padahal sebenarnya istilah kebijakan dengan keputusan merupakan kedua istilah yang jauh berbeda. Letak perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua istilah tersebut terletak pada luas cakupan dan arti pentingnya. Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah. Eyestone (dalam Winarno, 2012:20) mengartikan kebijakan publik secara luas sebagai hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya. Pendapat yang diutarakan oleh Eyestone tentang kebijakan publik sangat luas dan mencakup banyak hal sehingga terlihat tidak ada batasan dalam definisi Robert tentang kebijakan publik.

Ada beberapa ahli yang mengutarakan pendapatnya tentang kebijakan publik. sehingga kebijakan publik memiliki ragam denifisi Friedrich (dalam Wahab,2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai perangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan - hambatan sehingga mencapai sasaran dan tujuan yang telah diinginkan.

Pendapat lain juga dikatakan oleh Dye (dalam Agustino, 2008:7) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Sedangkan Anderson merumuskan kebijakan publik sebagai kegiatan - kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi satu masalah,dari pendapat beberapa ahli bisa disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu atau kelompok guna memecahkan masalah yang sedang dihadapi yang diharapkan bisa memberikan solusi terhadap masalah publik,pada pelaksanaan kebijakan tentu saja nantinya akan ditemui hambatan – hambatan,oleh sebab itu maka untuk menetapkan satu kebijakan bukanlah perkara yang mudah,kebijakan yang akan dibuat harus disesuaikan dengan mempertimbangkan nilai - nilai yang berlaku dalam masyarakat.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Kalau dipandang sebagai suatu kegiatan maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa evaluasi bukanlah proses akhir dari suatu kebijakan. Menurut Anderson evaluasi kebijakan dapat dirumuskan sebagai penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan, hal yang dinilai adalah isi, implementasi maupun dampaknya.

Kemudian Ripley (dalam Wiyoto, 2005:51) bahwa evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahapan kebijakan. namun dalam praktiknya, studi evaluasi tidak selalu mengambil fokus yang mencakup seluruh kebijakan. bahkan seringkali dilakukan dengan mengambil fokus pada salah satu tahapan kebijakan.

Dunn (dalam Nugroho, 2011:670) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai pemberi informasi mengenai nilai, manfaat dari suatu hasil kebijakan yang bisa di percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan bisa disebut sebagai kegiatan yang ditujukan untuk melihat sebab - sebab kegagalan dari suatu kebijakan yang telah

diimplementasikan ataupun sebaliknya,serta melihat dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan baik itu bisa dinilai menyangkut estimasi, substansi, implementasi maupun dampak.

Menurut Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2012:229) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Pertama, adalah untuk menentukan konsekuensi - konsekuensi apa yang timbul oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Beberapa pendapat dari para ahli tersebut peneliti mencoba menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang fungsional karena evaluasi kebijakan dilakukan bukan hanya pada titik penetapan dan implementasi suatu kebijakan, akan tetapi evaluasi kebijakan harus dilakukan sepanjang proses kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengukur efektifitas dan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan,evaluasi kebijakan juga diperlukan ketika proses perumusan beberapa alternatif - alternatif kebijakan,contohnya saja meramalkan dampak yang akan timbul dari masalah yang akan ditangani.

3. Tipe – Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson terdapat tiga - tipe evaluasi kebijakan dimana tipe tersebut masing-masing didasarkan pada pemahaman evaluator terhadap evaluasi. Tipe tipe tersebut adalah:

- 1) Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.
- 2) Tipe kedua, evaluasi memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu.
- 3) Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan yang sistematis.

Ketiga tipe tersebut merupakan tipe-tipe evaluasi, kemudian pada setiap tipe tersebut masing-masing tipe memiliki konsekuensi serta fokus apa yang akan menjadi kajian dalam evaluasi suatu kebijakan, Selain itu pendapat lainnya dari Dunn (dalam Nugroho, 2012:729)

Tipe-Tipe evaluasi terdiri:

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan.

Tabel 2.1 Tipe-tipe Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai

Kecukupan	hasil yang diinginkan? Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata pada kelompok - kelompok yang berbeda?
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok - kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan berguna atau bernilai?

Sumber: William Dunn (Nugroho, 2011 : 671)

Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian perasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik karena walupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi.

Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua namun tingkat konfliknya rendah. implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. Mengutip dari Nugroho yang mengembangkan model implementasi dari Matland dikembangkan menjadi empat pilah model implementasi kebijakan. Kebijakan yang bersifat kritikal bagi kehidupan bersama atau berkenaan dengan hidup mati atau eksistensi suatu negara, termasuk dalam hal ini pemerintahan yang sah dapat dengan dipaksakan, sehingga masuk dalam kelompok *directed*. Kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian misi negara-bangsa disarankan untuk dilaksanakan dengan pendekatan manajemen, dalam arti didelegasikan kepada berbagai aktor kelembagaan yang ada pada negara bersangkutan, mulai dari

lembaga negara dan pemerintahan hingga lembaga masyarakat, baik nirlaba maupun pelaba.

Kebijakan yang bersifat khusus, atau kebijakan yang mempunyai resiko yang tinggi jika gagal, disarankan untuk diimplementasikan dengan model *guided* dengan pendekatan *pilot project*. Kebijakan yang bersifat administratif, masuk dalam kelompok ini adalah kebijakan - kebijakan yang berkenaan dengan pelayanan publik yang mendasar, selanjutnya yang perlu dicermati adalah siapa aktor implementasi kebijakan berikut digambarkan pilihan pelaksana kebijakan. Pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah sebagai agensi eksekutif. Namun demikian, kita dapat melihat bahwa ada empat pilihan aktor implementasi yang sesungguhnya, yaitu :

1. Pemerintah, yang meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa. Kebijakan ini disebut dengan *eksistensial driven policy*. Pertahanan, keamanan, penegakkan keadilan, dan sebagainya. meskipun masyarakat dilibatkan, perannya sering kali dikategorikan sebagai *periferal*.
2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan kebijakan yang *government driven policy*, disini termasuk pelayanan KTP dan kartu keluarga yang melibatkan jaringan kerja non pemerintah di tingkat masyarakat.

3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. kebijakan kebijakan yang *social driven policy*, disini termasuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat subsidi dari pemerintah. termasuk di antaranya panti - panti sosial, yayasan kesenian, hingga sekolah - sekolah non pemerintah. masyarakat sendiri, yang dapat disebut *people (private) driven policy*. termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.

Selain itu dalam evaluasi juga terdapat evaluasi implementasi Seperti yang dikemukakan Nugroho (2012:706). Menurut Nugroho yang mengembangkan teori dari Matland pada dasarnya ada lima tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan:

a. Implementasi efektif dalam hal kebijakan yang sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dapat diindikasikan dengan sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal - hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah, *how excellent is the policy*. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga atau indikator ketiga adalah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

b. Implementasi yang tepat kedua atau yang efektif berkenaan dengan tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang efektif menurut tepat pelaksanaannya ini berkaitan dengan siapa pelaksana kebijakan ini, bagaimana wewenang dan kejelasannya. *On the street* siap menjadi pelaksana kebijakan.

a. Tepat ketiga adalah tepat target, ketepatan berkenaan dengan tiga hal. pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kebijakan di Indonesia untuk *income generating* diwarnai dengan banyaknya kebijakan pemberian kredit bersubsidi oleh berbagai departemen yang akhirnya overlapping dan saling mematikan di lapangan. kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, atukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target dalam kondisi menolak. Ketiga, apakah intervensi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya, terlalu banyak kebijakan yang tampaknya

baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.

- b. Tepat keempat adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Calista (dalam Nugroho, 2012:708) menyebutnya sebagai variable endogen yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dan berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat dan implementasi setting yang berkenaan dengan posisi tawar -menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring (*networking*) yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Lingkungan kedua adalah lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Calista (dalam Nograho, 2012:709) variabel eksogen, yang terdiri atas publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan *implementasi, interperetive instutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekanan dan kelompok kepentingan dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan *individualis*, yakni individu - individu

tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

c. Tepat kelima adalah tepat proses. Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses yaitu:

1. *Policy acceptance*, di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

2. *Policy adoption*, di sini publik menerima kebijakan sebagai aturan main yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

3. *Strategic readiness*, di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan di sisi lain birokrat.

4. Dimensi-Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dunn (dalam Nugroho, 2011). Memiliki pendapat bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat dimensi tersebut sebagai fokus evaluasi kebijakan.

a) Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Secara umum evaluasi formulasi berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik dilaksanakan, menggunakan

pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, mengarah pada permasalahan inti, mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal baik berupa waktu, dana, manusia maupun kondisi lingkungan.

b) Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Indikator dalam evaluasi implementasi kebijakan publik yang digunakan untuk menjawab 3 pertanyaan: bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik?, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu?, bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?

c) Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

Dimensi penilaian kinerja kebijakan yang berkenaan dengan: dimensi hasil, dimensi proses pencapaian hasil dan pembelajaran, dimensi sumber daya yang digunakan, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dimensi keberadaan dan perkembangan organisasi, dan dimensi kepemimpinan dan pembelajarannya.

d) Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik

Evaluasi lingkungan yaitu konteks lingkungan dikedepankan karena perubahan lingkungan terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang

lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan.

A.2. Tinjauan Kebijakan Pendidikan

1. Konsep Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses yang tidak bisa dilepaskan pada setiap kehidupan bersama dan berjalan sepanjang perjalanan umat manusia. Dewey mengemukakan bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai upaya *konservatif* dan *progresif* dalam bentuk pendidikan sebagai pendidikan sebagai formasi, sebagai rekapitulasi dan *retrospeksi*, serta sebagai rekonstruksi. Sementara pendapat lain juga dikemukakan oleh Hills yang memahami pendidikan sebagai proses belajar yang ditujukan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 1 Undang - undang No.20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS memahami pendidikan sebagai usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

Potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari beberapa pendapat tersebut bisa kita artikan bahwasanya pendidikan merupakan usaha manusia yang secara sengaja dilakukan sepanjang hidupnya untuk mengembangkan dirinya dengan pengetahuan baik cerdas secara batin maupun fisik.

2. Konsep Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang berkenaan di bidang pendidikan. Menurut Olsen, Codd dan O'Neil dalam buku kebijakan pendidikan yang unggul (Nugroho,2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi, bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Salah satu argument utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang akan memberikan hasil yang didukung oleh pendidikan. E.Goertz berpendapat kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.dengan demikian kebijakan pendidikan harus selaras dan satu arah dengan kebijakan publik.

Kebijakan pendidikan merupakan suatu kebijakan untuk pencapaian tujuan negara di bidang pendidikan dan merupakan salah satu tujuan dari keseluruhan tujuan negara. Undang - undang Nomor 25 tahun 2000 tentang PROPERNAS menyatakan ada tiga tantangan dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu:

- a) Mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai
- b) Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mamp bersaing dalam pasar kerja global

c) Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman, memperhatikan kebutuhan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Untuk memaksimalkan kebijakan pendidikan di Indonesia serta dengan adanya sistem otonomi daerah diharapkan akan ada kebijakan pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan hingga pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang ada di daerahnya. Kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, karena jika ada perubahan kebijakan publik maka akan ada perubahan pula pada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan biasanya cenderung mengarah dan berkiblat kepada kebijakan yang lebih luas.

3. Sasaran Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, diarahkan untuk mencapai hal - hal sebagai berikut:

a) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat indonesia menuju tercapainya manusia indonesia yang

berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.

- b) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa dan tenaga kependidikan.
- c) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional maupun lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- d) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- e) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip *desentralisasi*, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan iptek dan seni.

- g) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara mungkin terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
- h) Meningkatkan penguasaan pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi.
- i) Kemudian karakter-karakter khusus harus dimiliki oleh kebijakan pendidikan, antara lain: memiliki tujuan, memiliki aspek legal formal, memiliki konsep operasional dibuat oleh yang berwenang.

A.3. Pengertian Respon

1. Pengertian Respon

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan - pesan (Jalaludin Rahmat., 1999: 51).

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator (Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, 1983: 25). Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik (*feedback*) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi (Ahmad Subandi, 1982:50). Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator maka akan menetralsir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi. Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda - beda dalam mendefinisikan tanggapan, kesemuanya memiliki titik kesamaan.

2. Faktor Terbentuknya Respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan tidak hanya dari stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar, tidak semua stimulus yang ada persesuaian atau yang menarik darinya. dengan demikian maka akan ditanggapi adalah individu tergantung pada stimulus juga bergantung pada keadaan individu itu sendiri. Dengan

kata lain, stimulus akan mendapatkan pemilihan dan individu akan bergantung pada 2 faktor, (Bimo Walsito, 1999: 55) yaitu :

a. Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda intensitasnya pada diri individu yang melakukan tanggapan atau akan berbeda tanggapannya tersebut antara satu orang dengan orang lain. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan fisiologisnya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini intensitas dan jenis benda perangsang atau oang menyebutnya dengan faktor stimulus. Bimo walgito dalam bukunya menyatakan bahwa faktor psikis berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.

3. Macam-macam Respon

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chaferespon dalam (Jalaludin Rakhmat, 1999: 118) dibedakan menjadi tiga bagian:

1. *Kognitif* : yang dimaksud dengan respon *kognitif* adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
2. *Afektif* : yang dimaksud dengan respon *afektif* adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- 3) *Konatif (Psikomotorik)* : yang dimaksud dengan *psikomotorik* adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.

Adapun menurut Agus Sujanto (2004: 31), ada bermacam-macam tanggapan yaitu:

- a. Tanggapan menurut indera yang mengamati yaitu :
 - 1) Tanggapan *auditif*, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarnya, baik berupa suara, kekuatan dan lain-lain.
 - 2) Tanggapan *visual*, tanggapan terhadap sesuatu yang dilihat.
 - 3) Tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya.

b. Tanggapan menurut terjadinya, yaitu :

- 1) Tanggapan ingatan, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang diingatnya.
- 2) Tanggapan fantasi, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dibayangkan.
- 3) Tanggapan pikiran, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya.

c. Tanggapan menurut lingkungannya yaitu :

- d. Tanggapan benda, yaitu tanggapan terhadap benda yang menghampirinya atau berada didekatnya.

A.4. Tinjauan Tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Latar Belakang dan Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) sudah beberapa kali mengalami perubahan nama, mulai dari pendidikan moral pancasila (PMP), kewarganegaraan (KWN) pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKN), sekarang pendidikan kewarganegaraan (PKn), dan jika kurikulum yang baru diberlakukan tahun 2015 akan kembali kepada pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn).

Mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu

melakukan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, cerdas dan terampil menurut Helmi Hasan (2004) bahwa *Civic Education* itu adalah pembelajaran, dimana guru dan murid harus mampu mengawasi kebijakan pemerintah. Sementara itu menurut Yulinar Nur (2004) melihat ada tiga kompetensi yang wajib diperhatikan guru dalam PPKn yang mampu mengontrol kebijakan pemerintah, yaitu (1), peserta didik mampu berpikir kritis, rasional dan kreatif, dalam merespon isu-isu Kewarganegaraan, (2), peserta didik mampu berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan (3), peserta didik mampu membentuk diri berdasarkan kepada karakter - karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis.

Sebagai mana lazimnya semua mata pelajaran, mata pelajaran PPKn mempunyai visi, misi, tujuan dan ruang lingkup isi, visi mata pelajaran PPKn adalah terwujudnya suatu pelajaran yang berfungsi sebagai fasilitas pembinaan watak bangsa (*Nation and Character Building*) dan pemberdayaan warga negara.

Adapun misi pelajaran PPKn adalah membentuk warga negara baik, yakni warga negara yang sanggup melakukan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara sesuai dengan UUD 1945, sementara tujuan PPKn adalah (1), peserta didik

mempunyai kemampuan berfikir secara rasional, kritis, dan kreatif sehingga mampu memahami bermacam-macam wacana kewarganegaraan, (2), peserta didik mempunyai keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab, (3), peserta didik mempunyai watak dan kepribadian baik, sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejalan dengan tujuan PPKn, aspek - aspek kompetensi yang hendak dikembangkan dalam Pembelajaran PPKn mencakup pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang menyangkut bermacam - macam teori dan konsep politik, hukum, dan moral, keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skills*), keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) ini adalah dimensi yang paling substansif dan essensial dalam pembelajaran PPKn, sebab dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan akan membentuk watak/karakter, sikap dan kebiasaan hidup sehari-hari yang mencerminkan warga negara baik. Misalnya, religius, jujur, adil, demokratis, menghargai perbedaan, menghormati hukum, menghormati HAM, mempunyai semangat kebangsaan yang kuat, rela berkorban dan sebagainya.

Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak mempunyai paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan adalah bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: *citizenship*). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, sebab keduanya juga adalah satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, sebab masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda untuk warganya.

Kewarganegaraan mempunyai kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: *nationality*). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk mempunyai kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum adalah subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa mempunyai hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk mempunyai hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan mempunyai implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi

"kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya untuk perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan bermacam-macam kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (bahasa Inggris: *civics*) yang diberikan di sekolah - sekolah.

Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa memiliki sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dinamakan terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriotis dan lain sebagainya yang pada saat itu menempel erat pada setiap jiwa warga negaranya. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai itu makin lama makin hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa, oleh sebab itu perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai itu agar terus menyatu dalam setiap warga negara agar setiap warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena di nilai penting, pendidikan ini sudah di terapkan

sejak usia dini di setiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus - penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara.

Pancasila adalah ideologi dasar Negara Indonesia, yang digunakan untuk menjadi dasar Negara Indonesia dan pandangan hidup. Nama ini terdiri atas dua kata dari Sansekerta: panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat indonesia, dan tertulis pada paragraf ke-4 *preambule* (pembukaan) Undang - undang dasar 1945. Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 juni diperingati sebagai hari lahirnya pancasila.

2. Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

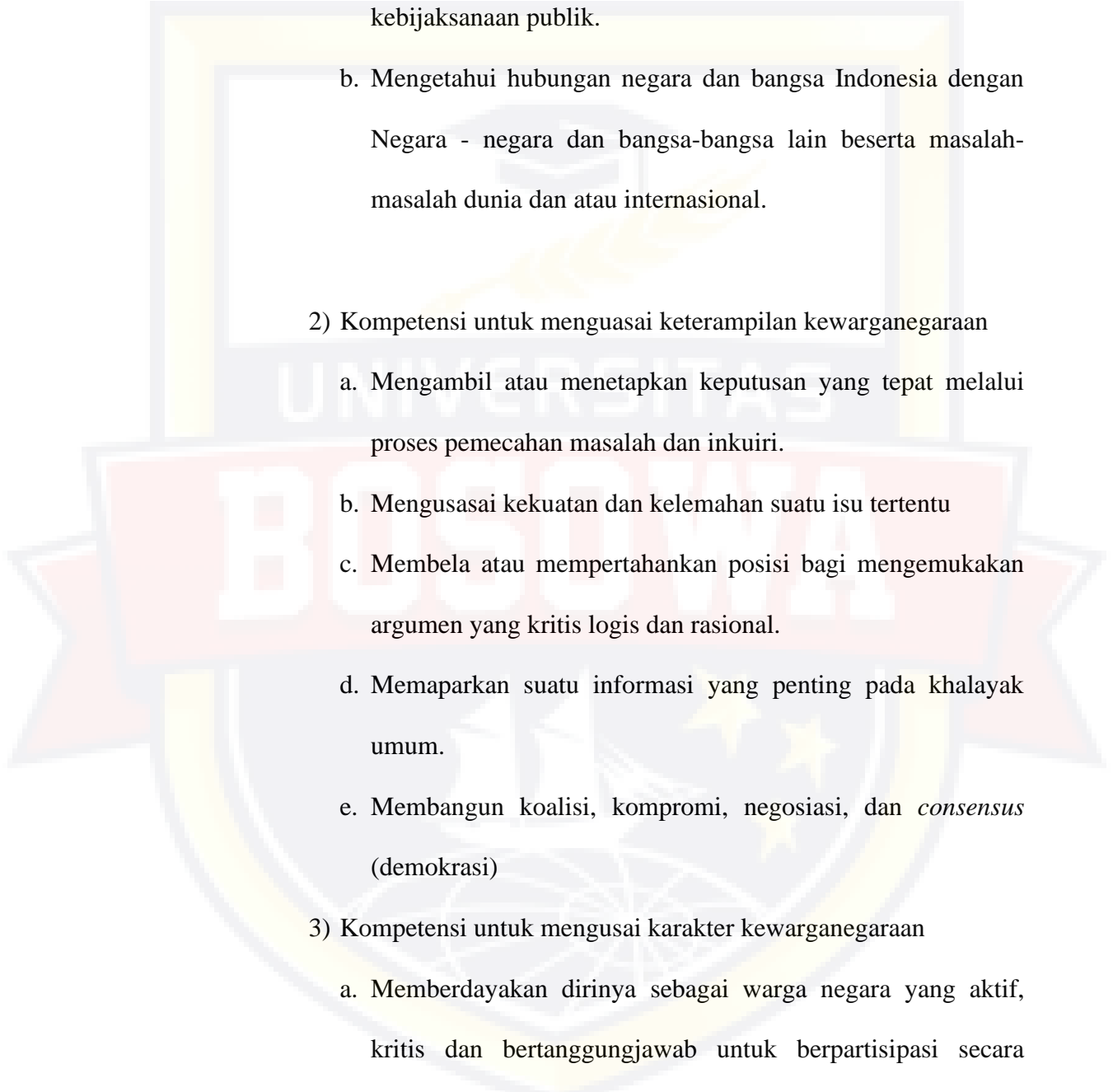
Karakteristik pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yaitu menuntut lahirnya warga negara dan warga masyarakat yang

pancasila, beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha esa yang mengetahui dan memahami dengan baik hak-hak dan kewajibannya yang didasari oleh kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai warga negara. karakteristik pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma baru, yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di indonesia yang dilaksanakan melalui berikut ini:

- 1) *Civic Intelligence*, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun social.
- 2) *Civic Reponsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggungjawab.
- 3) *Civic Participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggungjawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Sejalan dengan itu kompetensi - kompetensi yang hendak diwujudkan melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kompetensi untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan. memahami tujuan pemerintahan dan prinsip - prinsip dasar konstitusi Pemerintahan Republik Indonesia

- 
- a. Mengetahui struktur, fungsi dan tugas pemerintah daerah dan nasional sebagaimana keterlibatan warga negara membentuk kebijaksanaan publik.
 - b. Mengetahui hubungan negara dan bangsa Indonesia dengan Negara - negara dan bangsa-bangsa lain beserta masalah-masalah dunia dan atau internasional.
- 2) Kompetensi untuk menguasai keterampilan kewarganegaraan
- a. Mengambil atau menetapkan keputusan yang tepat melalui proses pemecahan masalah dan inkuiri.
 - b. Mengusai kekuatan dan kelemahan suatu isu tertentu
 - c. Membela atau mempertahankan posisi bagi mengemukakan argumen yang kritis logis dan rasional.
 - d. Memaparkan suatu informasi yang penting pada khalayak umum.
 - e. Membangun koalisi, kompromi, negosiasi, dan *consensus* (demokrasi)
- 3) Kompetensi untuk menguasai karakter kewarganegaraan
- a. Memberdayakan dirinya sebagai warga negara yang aktif, kritis dan bertanggungjawab untuk berpartisipasi secara efektif dan efisien dalam berbagai aktivitas masyarakat, politik dan pemerintahan dalam semua tingkat (daerah dan nasional).

- b. Memahami bagaimana warga negara melaksanakan peranan, hak dan tanggung jawab personal untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat pada semua tingkatan (daerah dan nasional).
- c. Memahami, menghayati dan menerapkan nilai - nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari - hari.

3. Ruang Lingkup Materi Pembelajaran PPKn

Menurut PP Mendiknas No. 2 Tahun 2006 dalam Sutarjo Adisusilo (2014, hlm. 129-130) ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek - aspek sebagai berikut.

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa indonesia, sumpah pemuda, keutuhan negara kesatuan republik indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan republik indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.

- 3) Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 5) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, PERS dalam masyarakat demokrasi.
- 6) Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

- 7) Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

4. Sumber Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Sumber pengajaran adalah sumber dari mana bahan pelajaran dan media pengajaran diambil, diperoleh dan dicari. penentuan jenis sumber tergantung pada metode, media, dan bahan pembelajaran disamping memperhatikan pada kemampuan dan kesediaan peserta didik.

A.Kosasih Djahiri (2006, hlm. 17) mengemukakan bahwa sumber pelajaran layak dan benar untuk PPKn adalah sebagai berikut.

1) Sumber Formal

- a. Pancasila, UUD 1945 dan seluruh perangkat hukum yang berlaku baik dokumenter maupun dari sumber dan publikasi lembaga yang berwenang.
- b. Agama yang diakui oleh republik Indonesia dan nilai-nilai luhur budaya bangsa (lokal dan nasional).

2) Sumber literatur keilmuan yang tidak dilarang.

3) Media masa (cetak maupun elektronik).

- 4) Narasumber yang layak, baik secara keilmuan, sosial, politik, budaya maupun keagamaan.

B. Penelitian Terdahulu

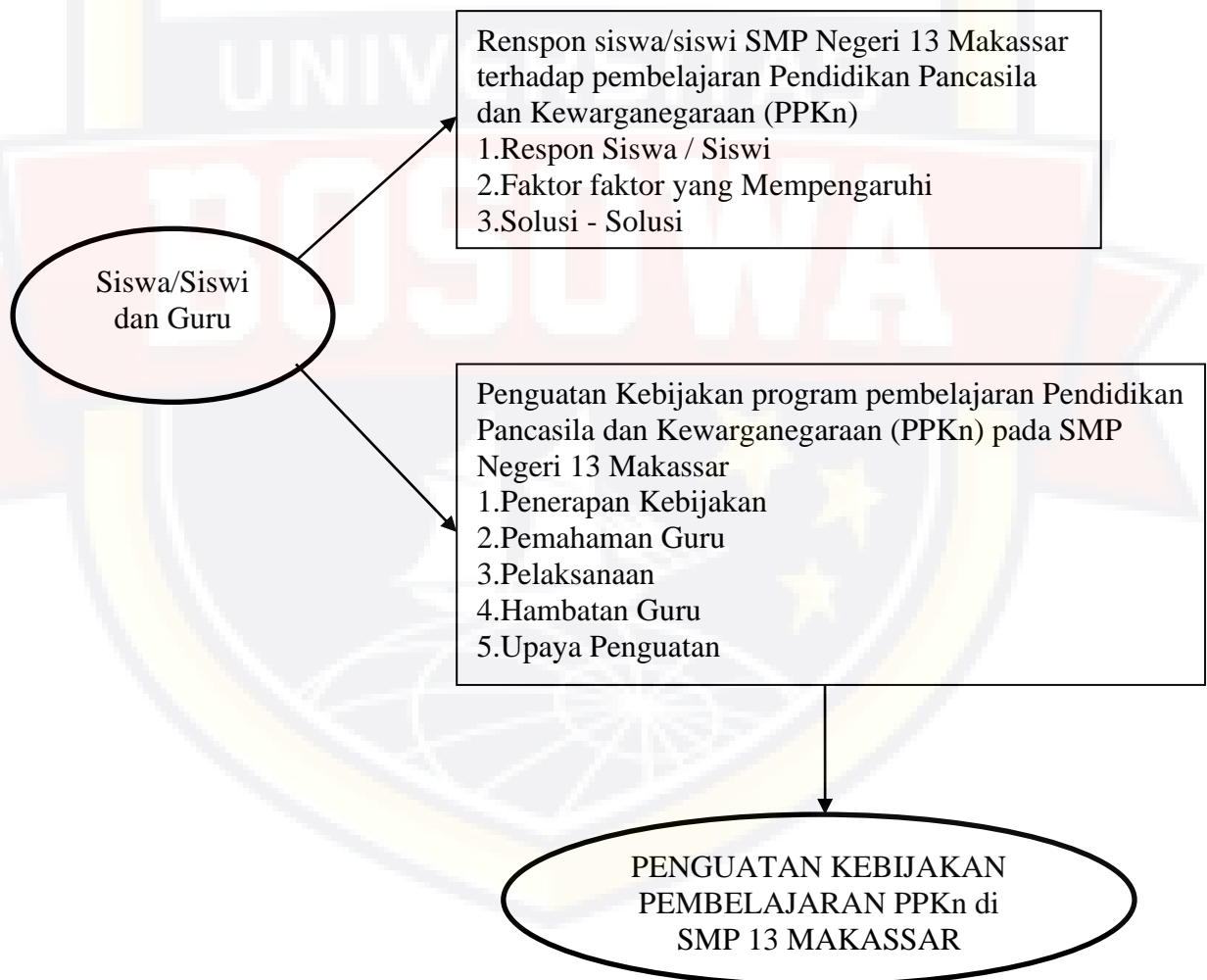
Penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, sebab penelitian – penelitian terdahulu dirasa sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini antara lain

1. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Dasar Dalam Pembelajaran PKN Sebagai Wahana Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Yang Ada di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama Selama Ini
2. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran PPKn Sebagai Wahana Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa di Lingkungan Sekolah Menengah Pertama.
3. Persepsi, sikap, dan Perilaku Guru dan Pelajar Terhadap Konsep Dasar Pembelajaran PPKn Sebagai Wahana Pendidikan Budaya.
4. Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Pemahaman Dan Pengamalan Nilai-Nilai Falsafah Negara Bagi Peserta Didik Pada SMP di Kota Makassar.
5. Kajian Dan Analisis Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama.
6. Pengkajian Dan Formulasi Rancangan Kebijakan Baru Tentang Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Menghasilkan Kurikulum Sesuai

Dengan Nilai-Nilai Falsafah dan Budaya Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Landasan Peserta Didik

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep penelitian tersebut maka dibangun kerangka pikir atau model yang di gunakan dalam penelitian ini sebagaimana yang di maksud dalam gambar ini:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Djam'an Satori (2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena - fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu

yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar - gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 73), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena - fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena proses Bagaimana pengaruh program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter bangsa terhadap peserta didik dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai pancasila di sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Makassar selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Bulan Maret 2019 di SMP Negeri 13 Makassar beralamat di Jalan Jl. tamalate VI No.294, Kassi-kassi, Rappocini, Kota Makassar, Alasan pemilihan lokasi dan

tempat penelitian karena Sekolah ini merupakan salah satu sekolah menengah pertama unggulan di Kota Makassar. Selain itu sekolah ini juga merupakan sekolah yang berada di tengah – tengah pemukiman penduduk yang tepatnya berada di perbatasan 2 kecamatan antara kecamatan Rappocini dan kecamatan Panakkukang

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu tentang sejauh mana penguatan pembelajaran PPKn pada SMP Negeri 13 Makassar sehingga diketahui sejauh mana respon siswa dan siswi SMP Negeri 13 dalam memahami pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan faktor – faktor yang memengaruhinya. disamping itu pula penguatan kebijakan pembelajaran PPKn pada SMP Negeri 13 sangat mempengaruhi baik dari segi penerapan, pemahaman guru, hambatan guru serta upaya penguatan.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (*citizenship education*) merupakan salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional, sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) di tengah heterogenitas dan *pluralism* yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia.

Pada konteks ini, terminologi “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan multikultural menjadi istilah yang tepat dan relevan untuk dikembangkan dalam ranah pendidikan Indonesia sebagai bangsa

yang plural. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan untuk Indonesia, pembelajaran PPKn di SMP negeri 13 Makassar, yang dilakukan oleh peneliti dan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merasakan sebuah kegalauan dan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pembelajaran PPKn di SMP negeri 13 Makassar, yang perlu dicarikan solusi secepatnya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan atau sistem pendidikan yang yang dapat berperan dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam tatanan cita ideal masyarakat multikultural yang demokratis dan berkeadaban .

Dilihat dari segi PPKn di SMP negeri 13 Makassar tantangan tersebut belum dapat dijawab dengan kurikulum yang ada berangkat dari kondisi di atas, dirasa sangat urgen dan perlu pengkajian dan pengorganisasian kurikulum PPKn di SMP negeri 13 Makassar melalui pengembangan kompetensi kewarganegaraan (*civic competency, civic skill, and civic participation*) Oleh karena itu, harus jelas landasan sosiologis dan paedagogis PPKN di SMP negeri 13 Makassar yang dikembangkan dari dimensi nilai perspektif.

D. Sampel Data Penelitian

Sampel data dalam penelitian ini adalah semua unsur unsur yang ada di dalam ruang lingkup SMP Negeri 13 Makassar terkhusus unsur - unsur yang langsung berkaitan dengan hal hal yang akan di teliti oleh peneliti, informan sangat di butuhkan sekali dalam menggali data yang akan di butuhkan oleh

peneliti sehingga peneliti harus jeli membaca setiap informasi yang di berikan oleh informan.

Unsur – unsur yang ada dalam ruang lingkup SMP Negeri 13 Makassar dianggap mampu memberikan informasi tentang hal yang akan di teliti sehingga tujuan yang akan dicapai peneliti dapat tercapai sehingga informasi yang didapatkan akan bermamfaat.

Adapun informan yang di butuhkan

1. Kepala Sekolah : 1 Orang
2. Komite Sekolah : 1 Orang
3. Tata Usaha : 1 Orang
4. Wakasek Urusan Kurikulum : 1 Orang
5. Wakasek urusan Kemasyarakatan : 1 Orang
6. Guru Mata Pelajaran PPKn : 1 Orang
7. Koordinator BK : 1 orang
8. Siswa/Siswi Kelas VII : 5 Orang

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian ialah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan sebagai pengumpul data penelitian dengan bantuan beberapa alat pendukung seperti buku, dokumen, pedoman wawancara, dll. maka dari itu, peneliti sebagai instrumen melakukan validasi terkait dengan kesiapan melakukan penelitian sebelum peneliti terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen penelitian meliputi pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif dan penguasaan

wawasan terhadap objek yang diteliti, yakni Penguatan kebijakan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar di kota Makassar.

Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan alat bantu pengumpulan data yaitu berupa buku catatan, handphone untuk merekam pembicaraan dengan informan, pedoman wawancara maupun perangkat observasi selama proses penelitian berlangsung dengan memperhatikan waktu dan kondisi dari subjek yang akan kami wawancarai sehingga hasil yang informasi dan data yang kami dapatkan dapat kami gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Terdapat dua jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data Primer

Sumber aslinya yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti yaitu instansi terkait yaitu Dinas Pendidikan Kota Makassar, Guru SMP Negeri 13 Makassar di Kota Makassar. data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui daftar pertanyaan, yang merupakan alat untuk mengumpulkan data berupa kuesioner, yang terdiri dari pertanyaan tentang identitas responden dan tentang variabel yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui instrumen penelitian yang berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari SMP Negeri 13 Makassar di Kota Makassar

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari teori - teori dan buku - buku ilmiah, makalah - makalah, panduan pelaksanaan pendidikan karakter, bahan pelatihan pendidikan karakter, dan informasi yang berasal dari internet. Sedangkan terkait data lapangan diperoleh dari subjek dan objek yang diteliti yaitu proses pembelajaran PPKn SMP Negeri 13 Makassar, guru, dan respon siswa/siswi SMP Negeri 13 Makassar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur (*structured interview*) kepada guru PPKn dan peserta Didik . wawancara berstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis yang sudah disusun sebelumnya. bila diperlukan wawancara juga dapat dilakukan secara tidak terstruktur yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

2. Observasi atau pengamatan adalah pencatatan dengan sistematis fenomena - fenomena yang di selidiki. Observasi merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang pada dasarnya mengamati gejala fisik dan sosial sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal yang di observasi adalah aspek tingkah laku manusia, mengenai gejala alam ataupun mengenai sesuatu perubahan yang nampak.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, dokumentasi merupakan data - data yang tertulis untuk mengetahui suatu keadaan suatu objek baik lampau maupun data - data baru. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk dokumen, catatan harian, cinderamata, laporan foto, dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2008: 335) analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan - bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Langkah analisis data yang digunakan adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman (1992: 19). Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal - hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data situasi sosial dalam penelitian ini difokuskan pada

guru, peserta didik, orang tua peserta didik, dan *stakeholder* tentang proses kegiatan belajar yang berlangsung.

2. Display Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay data. proses ini dilakukan dengan jalan membuat teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi/ Menarik Kesimpulan

Tahap ini merupakan jawaban dari kesimpulan awal yang bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti begitu pula sebaliknya, penarikan kesimpulan dengan membandingkan dan menganalisis secara mendalam untuk memperoleh makna dan tema sebagai dasar untuk menyusun tesis, yang akhirnya menarik kesimpulan sebagai landasan memberikan rekomendasi penelitian.

Langkah analisis data yang penulis lakukan adalah:

- a. Mengorganisasi informasi.
- b. Membaca keseluruhan informasi dan memberi kode.
- c. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya.
- d. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori.
- e. Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun untuk penerapannya pada kasus yang lain.
- f. Menyajikan secara naratif.

I. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh, oleh peneliti kemudian diuji validitasnya. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini data dalam bentuk angka atau nilai, kata-kata, ekspresi, ungkapan, foto atau gambar, dokumen, dsb. Agar data dalam penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti menggunakan teknik analisa data dalam penelitian ini:

1. *Member Check*

Member check adalah memeriksa kembali keterangan - keterangan atau informasi data yang diperoleh selama observasi dan wawancara dari narasumber yang relevan dengan penelitian apakah keterangan atau informasi sifatnya tetap, tidak berubah, sehingga bisa dipastikan keajegannya data diperiksa kebenarannya (Kusnandar, 2008: 107)

2. *Triangulasi*

Triangulasi adalah memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk atau analisis dari si peneliti dengan membandingkan hasil dari mitra peneliti. Triangulasi dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang guru sebagai peneliti, sudut pandang peserta didik, dan sudut pandang mitra peneliti yang melakukan pengamatan atau observasi (Kusnandar, 2008: 107).

3. *Audit Trail*

Audit trail adalah memeriksa kesalahan - kesalahan dalam metode dan prosedur yang digunakan peneliti dalam mengambil kesimpulan (Kusnandar, 2008: 108). *Audit trail* dilakukan oleh kawan sejawat peneliti yang dirasakan memiliki kemampuan lebih tentang penelitian.

4. *Expert Opinion*

Expert opinion meminta kepada orang yang dianggap ahli atau pakar penelitian atau pakar bidang studi untuk memeriksa tahapan - tahapan penelitian dan memberikan arahan atau *judgements* terhadap masalah masalah penelitian yang dikaji (Kusnandar, 2008: 108).*Expert opinion* ini, peneliti minta kepada pembimbing penulisan penelitian ini yaitu:

Bapak Dr.Syamsul Bahri,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing I dan Dr.Hj.Juharni.,M.Si selaku pembimbing II

J. Operasional Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan suatu langkah penelitian, dimana peneliti menurunkan variabel penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator – indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi operasionalisasi konsep ini adalah mempermudah peneliti dalam melakukan pengukuran. ukuran baik tidaknya kerangka konsep, sangat ditentukan oleh seberapa tepat dimensi-dimensi yang diurai dalam memberikan gambaran tentang variabel. Hal ini merujuk kepada bagaimana peneliti mengklasifikasikan suatu kasus dalam satu kategori tertentu.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Konsep

Variabel	Indikator	Lingkup Operasional Konsep	Tahapan
-----------------	------------------	-----------------------------------	----------------

Siswa/Siswi dan Guru	Renspon siswa/siswi SMP Negeri 13 Makassar terhadap pembelajaran Pendidikan Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegetahui sejauh mana Respon Siswa / Siswi terhadap pelajaran PPKn yang di implementasi di SMP Negeri 13 Makassar 2. Menemukan dan mengetahui apa saja Faktor faktor yang Mempengaruhi siswa/siswi yang memahami pelajaran PPKn serta mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi siswa/siswi 3. Mencari Solusi – Solusi dan jalan keluar yang dapat di implementasi di SMP Negeri 13 4. Makassar sehingga minat siswa/siswi terhadap mata pelajaran PPKN dapat meningkat 	Wawancara
Variabel	Indikator	Lingkup Operasional Konsep	Tahapan

Penguatan Kebijakan program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada SMP Negeri 13 Makassar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui sejauh mana Penerapan Kebijakan mata pelajaran PPKn yang tertuan dalam peraturan pemerintah tentang Kuirkulum 2013 2. Mengetahui sejauh mana Pemahaman Guru tentang kebijakan penguatan kebijakan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar 3. Mengetahui bagaimana Pelaksanaan dan penguatan Kebijakan Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar 4. Mengetahui dan menemukan apa yang menjadi Hambatan Guru dalam pelaksanaan penguatan kebijakan pembelajaran PPKn pada SMP Negeri 13 Makassar 5. Mengetahui dan menemukan Upaya dalam rangka Penguatan kebijkana terhadap pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar 	Wawancara Observasi
--	--	------------------------

Keputusan untuk mengambil data berdasarkan variabel yang akan di teliti dan diamati, tahapan dalam penelitian dapat di lakukan dengan sistem wawancara langsung dan melakukan observasi langsung di lapangan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Objek penelitian yang akan kami lakukan yaitu satuan pendidikan SMP Negeri 13 Kota Makassar. SMP Negeri 13 Makassar berlokasi di Jl. Tamalate VI No.294, Kassi-Kassi, Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di tengah tengah pemukiman masyarakat yang persis berada di perbatasan 2 kecamatan di Kota Makassar yaitu di antara Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini dan juga di apit oleh 2 sekolah yaitu SMP Negeri 33 yang terletak di selatan selatan SMP Negeri 13 dan SDN Inpres Perumnas yang berada di sebelah utara Sehingga hampir disetiap hari sekolah di kompleks ini sarat dengan peserta didik disamping itu pula posisi SMP Negeri 13 Makassar tidak jauh dari lokasi kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar.

SMP Negeri 13 Kota Makassar merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Makassar disamping letaknya yang strategis karena berada di tengah - tengah kota Makassar juga karena kualitas yang bagus dengan memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dan juga berpengalaman, Sehingga tidak heran SMP Negeri 13 Kota Makassar dari setiap penerimaan murid baru setiap tahun pelajaran pasti banyak masyarakat yang mengantri untuk memasukkan anaknya untuk bisa masuk dan di didik di SMP Negeri 13 Makassar.

Kualitas yang bagus dari SMP Negeri 13 Kota Makassar tidak lepas dari tanggungjawab dan kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun *team work* di dalam sekolah serta menciptakan suasana kondusif dan komunikasi antara guru dan guru serta komunikasi antara guru dan siswa SMP Negeri 13 Makassar itu sendiri.

2. Profil Sekolah

Berikut Profil sekolah SMP Negeri 13 Kota Makassar yang kami gambarkan sebagai berikut:

Nama Sekolah : SMP Negeri 13 Makassar
Alamat : Jl.Tamalate VI No.294, Kassi-Kassi, Rappocini,
Kota Makassar,Provinsi Sulawesi Selatan
NPSN/NIS : 40307334 / 201196009068
Status Sekolah : Negeri
Akreditasi : A
No Akreditasi : 68 /SK/BAP-SM/X/2014
Luas Tanah : 17,693 M2
Email : smpn13_mksr@yahoo.co.id
Website : <http://www.smpn13makassar.sch.id>
Kurikulum : Kurikulum 2013

Visi Misi Sekolah

a. Visi :

“Dengan Dasar Imtaq, Kita Wujudkan Siswa Mandiri Yang Menguasai IPTEK, Inovatif, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”

- b. Misi :1. Membudayakan kedisiplinan
2. Mewujudkan suasana yang berbudaya
3. Melaksanakan Pengembangan inovasi
4. Mewujudkan siswa cerdas
5. Mengembangkan sumberdaya manusia

3. Gambaran Umum Tentang Pendidik/Guru, Tenaga Kependidikan SMP Negeri 13 Makassar

Tabel 4.1
Gambaran Umum Tentang Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik SMP Negeri 13 Makassar

Uraian/Jenis Kelamin	Guru	PTK	PD
Laki-laki	14	16	483
Perempuan	43	50	611
Total	57	66	1094

Sumber dapodik Februari 2019 Tahun Ajaran 2018/2019

Berdasarkan tabel 4.1 tentang gambaran umum pendidik/guru, tenaga kependidikan dan peserta didik SMP Negeri 13 Makassar, di atas ini menunjukkan dilihat dari jenjang gurunya atau pendidik berdasarkan jenis kelamin mayoritas didominasi dari pihak perempuan yang berjumlah 43 orang dibanding dengan pihak laki-laki yang hanya berjumlah 14 orang, dengan presentase perempuan sebesar 75,43 % dan laki-laki 18,66 %, dari jumlah keseluruhan guru sebanyak 57 orang, sedangkan untuk data tenaga kependidikan berjumlah 66 orang yang apabila dilihat dari jenis kelamin jumlah perempuan sebanyak 50 orang dan jumlah laki-laki sebanyak 16 orang hal ini menunjukkan bahwa tetap dari segi

tenagakependidikan masih di dominasi dari pihak perempuan di banding laki – laki dengan presentase untuk perempuan sebesar 75,75 % dan laki – laki sebesar 24,23 %.

dan untuk peserta didik yang berjumlah total 1094 juga masih di dominasi perempuan di banding laki – laki dengan jumlah perempuan 611 orang dan laki – laki sebanyak 483 orang dengan presentase perempuan 55,85 % dan laki – laki 44,14 %. dari ketiga uraian di atas dapat menunjukkan bahwa kalau dilihat dari jenis kelamin sangat jelas menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan sangat dominan disbanding laki – laki.

4. Keadaan Guru dan TenagaKependidikan

Tabel 4.2
Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Status Kepegawaian

Guru		Tenaga Kependidikan	
Status	Jumlah	Status	Jumlah
PNS	53	PNS	5
GTT		GTT	
GTY		GTY	4
Honor Sekolah	3	Honor Sekolah	
Total	56	Total	9

Sumber: dapodik Februari 2019 Tahun Ajaran 2018/2019

Tabel 4.3
Guru dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Golongan

Guru		Tenaga Kependidikan	
Golongan	Jumlah	Status	Jumlah
I		PNS	
II		PNS	
III	9	PNS	4
IV	44	PNS	1
Total	53	Total	5

Sumber: dapodik Februari 2019 Tahun Ajaran 2018/2019

5. Keadaan Siswa

Keadaan siswa di SMP Negeri 13 Makassar sangat kompleks dan di bedakan berdasarkan pembagian usia yang di tandai dengan adanya pembagian kelas dalam hal ini dapat di gambarkan dalam bentuk tabel :

Tabel 4.4
Peserta Didik Berdasarkan Tingkatan, Agama, Umur dan Jenis Kelamin

Tingkatan	Agama	Jml	Umur	Jml	JK		
Tingkat	Jumlah	islam	1030	< 13 Tahun	16	LK	486
Kelas 7	390	Kristen	62	13- 15 Tahun	882	PR	608
Kelas 8	360	Katholik	0	> 15 Tahun	96		
Kelas 9	344	Hindu	2				
		Budha	0				
		Kong	0				
		Hu Chu	0				
		Lain	0				
		nya	0				
Total	1094		1094		1094		1094

Sumber dapodik Februari 2019 Tahun Ajaran 2018/2019

Berdasarkan data diatas mengenai data peserta didik berdasarkan tingkatan, agama, umur dan jenis kelamin ini menunjukkan gambaran bahwa

keadaan peserta didik SMP Negeri 13 Makassar sangat kompleks dan menggambarkan populasi yang sangat banyak

Dari data tersebut diatas dilihat dari segi agama hampir mayoritas peserta didik SMP Negeri 13 Makassar beragama islam dengan presentase dari total keseluruhan untuk yang beragama islam sebanyak 1030 siswa/siswi dengan presentase 94,14 % dan beragama Kristen sebanyak 62 orang dgn persentase 31 % dan beragama Hindu sebanyak 2 orang dengan persentase 0,18 % demikian pula kalau melihat dari segi jenis kelamin untuk laki laki sebanyak 486 orang dengan persentase 44 % dan perempuan sebanyak 608 orang dengan persentase 55,57 % dari presentase berdasarkan jenis kelamin menunjukkan peserta didik SMP Negeri 13 Makassar di dominasi peserta didik perempuan dan hampir sebahagian besar beragama islam.

6. Sarana dan Prasarana Sekolah

Tabel 4.5
Berdasarkan Kondisi Sarana dan Prasarana SMP Negeri 13 Makassar

No	Jenis Prasarana	Nama	Panjang (m)	Lebar (m)	Milik	Kondisi
1	Gudang	Ruang	5.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
2	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9K	9.0	7.0	Milik	Baik
3	Ruang Keterampilan	Ruang	15.0	10.0	Milik	Rusak Ringan
4	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7E	9.0	7.0	Milik	Baik
5	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8H	9.0	7.0	Milik	Baik
6	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7G	9.0	7.0	Milik	Baik

No	Jenis Prasarana	Nama	Panjang (m)	Lebar (m)	Milik	Kondisi
7	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9E	9.0	7.0	Milik	Baik
8	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9G	9.0	7.0	Milik	Baik
9	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7F	9.0	7.0	Milik	Baik
10	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8B	9.0	7.0	Milik	Baik
11	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9A	9.0	7.0	Milik	Baik
12	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9F	9.0	7.0	Milik	Baik
13	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9I	9.0	7.0	Milik	Baik
14	Laboratorium Komputer	Laboratorium Komputer	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
15	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8F	9.0	7.0	Milik	Baik
16	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9B	9.0	7.0	Milik	Baik
17	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9C	9.0	7.0	Milik	Baik
18	Lainnya	Ruang Pramuka	6.0	4.0	Milik	Rusak Ringan
19	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7I	9.0	7.0	Milik	Baik
20	Ruang Olahraga	Ruang	35.0	35.0	Milik	Rusak Ringan
21	Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	15.0	15.0	Milik	Rusak Ringan
22	Lainnya	Lapangan Volly	20.0	15.0	Milik	Baik
23	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8K	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
24	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9H	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
25	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7A	9.0	7.0	Milik	Baik
26	Ruang Ibadah	Ruang	10.0	10.0	Milik	Rusak Ringan
27	Kamar Mandi/WC	Ruang	2.0	2.0	Milik	Rusak Ringan

No	Jenis Prasarana	Nama	Panjang (m)	Lebar (m)	Milik	Kondisi
28	Ruang OSIS	Ruang	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
29	Ruang TU	Ruang	11.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
30	Ruang Kepala Sekolah	Ruang	9.0	3.0	Milik	Rusak Ringan
31	Lainnya	Ruang PMR	6.0	6.0	Milik	Rusak Ringan
32	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7H	9.0	7.0	Milik	Baik
33	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8A	9.0	7.0	Milik	Baik
34	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8D	9.0	7.0	Milik	Baik
35	Rumah Penjaga Sekolah	Ruang	30.0	3.0	Milik	Rusak Ringan
36	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9J	9.0	7.0	Milik	Baik
37	Koperasi/Toko	Ruang	5.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
38	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 9D	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
39	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	Ruang	5.0	5.0	Milik	Rusak Ringan
40	Ruang Guru	Ruang	18.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
41	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7C	9.0	7.0	Milik	Baik
42	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8G	9.0	7.0	Milik	Baik
43	Ruang Keterampilan	Ruang Keterampilan	14.0	9.0	Milik	Baik
44	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7D	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
45	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8J	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
46	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8C	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
47	Ruang Teori	Ruang 7B	9.0	7.0	Milik	Rusak

No	Jenis Prasarana	Nama	Panjang (m)	Lebar (m)	Milik	Kondisi
48	Ruang BP/BK	Ruang	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
49	Ruang Perpustakaan	Ruang	18.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
50	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 7J	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
51	Ruang UKS	Ruang	9.0	7.0	Milik	Rusak Ringan
52	Laboratorium IPA	Ruang	10.0	15.0	Milik	Rusak Ringan
53	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8I	9.0	7.0	Milik	Baik
54	Ruang Olahraga	Lapangan Olahraga	38.0	30.0	Milik	Baik
55	Ruang Teori/Kelas	Ruang Kelas 8E	9.0	7.0	Milik	Baik
56	Lapangan	Lapangan Futsal	38.0	30.0	Milik	Baik

Sumber: Dapodik Februari 2019 Tahun Ajaran 2018/2019

Mengacu pada Undang - Undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang kemudian diikuti dengan terbinya pp no. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan yang selanjutnya dilakukan perubahan pada PP No. 23 tahun 2013 disebutkan lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar proses, standar pembiayaan dan standar penilaian

Terkait mengenai sarana dan prasarana sekolah khususnya di SMP Negeri 13 Makassar adalah merupakan hal yang sangat penting yang merupakan hal yang dapat menunjang kelancaran proses pembelajaran sehingga proses mulai pengadaan sampai pemeliharaan harus tetap di perhatikan.

Melihat daftar sarana prasarana SMP Negeri 13 Makassar menunjukkan hal yang bagus dan memadai sebagai penunjang proses belajar mengajar peserta didik sebanyak 1094 orang

7. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan negara republik Indonesia No 47 tahun 2017 tentang pedoman organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan maka dengan demikian struktur organisasi di SMP Negeri 13 Makassar di komando oleh kepala sekolah dengan garis vertikal keatas yaitu Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai Pembina.

Kepala Sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam struktur komite sekolah di dalam suatu sekolah, baik dari tingkat pendidikan dasar, hingga tingkat pendidikan menengah. Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA ini, kita sudah tentu mengenal istilah kepala sekolah ini, yaitu guru yang diberi tugas dan juga amanah sebagai pemimpin yang menjalankan segala bentuk kegiatan sekolah, baik kegiatan operasional, maupun kegiatan non-operasional yang berhubungan dengan sekolah dan strukturnya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu:(a) kepribadian,(b) manajerial,(c) kewirausahaan,(d) supervisi,(e) sosial.

A. Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah

1. Fungsi Manajerial

Fungsi pertama yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah fungsi manajerial, fungsi manajerial ini merupakan fungsi penting dari kepala sekolah, karena kepala sekolah dituntut untuk mampu dan juga handal dalam mengatur serta mengatur setiap kegiatan, dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah tempat dia memimpin.

Sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa fungsi manajerial dari seorang kepala sekolah memiliki pengaruh yang positif terhadap keseluruhan kegiatan sekolah dan juga perangkat sekolah, mulai dari suasana belajar mengajar yang kondusif, prestasi akademik, hingga meningkatnya kinerja dari guru yang mengajar. Sebagai perangkat sekolah yang memiliki fungsi manajerial,

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi dari jabatan kepala sekolah yang kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan fungsi yang juga tidak kalah penting dengan fungsi manajerial. Pada fungsi ini, setiap kepala sekolah dituntut untuk mampu membuat dan menyusun perencanaan kegiatan, baik kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan pelatihan para guru dan staf, serta berbagai perencanaan lainnya yang menyangkut masa depan sekolah yang dipimpinnya. Ketika seorang kepala sekolah tidak mampu untuk menjalankan fungsi perencanaannya dengan baik, maka hal ini akan menyebabkan perjalanan sekolah

tersebut akan terganggu, dan tentu saja akan berdampak buruk bagi sekolah itu sendiri dan akan menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

3. Fungsi Pengawasan

Kepala sekolah juga memiliki fungsi penting lainnya, yaitu fungsi pengawasan. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran, fungsi dan juga wewenang dalam menegakkan keadilan, dan juga peraturan yang berlaku di lingkungan sekolahnya. Selain itu, kepala sekolah juga wajib mengawasi setiap kegiatan sekolah, yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah, ataupun di luar lingkungan sekolah yang membawa nama baik sekolah. fungsi pengawasan ini meskipun terkesan mudah, namun sebenarnya sulit untuk dilakukan, karena melalui fungsi pengawasan ini, kepala sekolah dituntut untuk menjadi individu yang lebih objektif dan juga adil dalam melakukan pengawasan, baik pemberian sanksi, hukuman, ataupun reward kepada setiap perangkat sekolah.

4. Fungsi Dukungan dan Fungsi Sosial

Kepala sekolah juga dituntut memiliki fungsi dukungan dan juga fungsi sosial bagi setiap perangkatnya. Hal ini berarti, setiap kepala sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan kepada setiap perangkatnya, dan juga berlaku adil dan memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu siapa pun yang membutuhkan pertolongan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Wakasek Urusan Kurikulum

1. Menyusun program pengajaran (Program Tahunan dan Semester).

2. Menyusun Kalender Pendidikan.
3. Menyusun SK pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan lainnya.
4. Menyusun jadwal pelajaran.
5. Menyusun Program dan jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah / Nasional.
6. Menyusun kriteria dan persyaratan siswa untuk naik kelas/tidak serta lulus/tidak siswa yang mengikuti ujian.
7. Menyusun jadwal penerimaan buku laporan pendidikan (Raport) dan penerimaan STTB/Ijasah dan STK.
8. Menyediakan silabus seluruh mata pelajaran dan contoh format RPP.
9. Menyediakan agenda kelas, agenda piket, surat izin masuk/keluar, agenda guru (yang berisi: jadwal pelajaran, kontrak belajar dengan siswa, absensi siswa, form catatan pertemuan dan materi guru, daftar nilai, dan form *home visit*).
10. Penyusunan program KBM dan analisis mata pelajaran.
11. Menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru.
12. Memeriksa program satuan pembelajaran guru.
13. Mengatasi hambatan terhadap KBM.
14. Mengatur penyediaan kelengkapan sarana guru dalam KBM (kapur tulis, spidol, dan isi tintanya, penghapus papan tulis, daftar absensi siswa, daftar nilai siswa, dsb)
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan KBM dan laporan pelaksanaan KBM.

16. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyusunan satuan pelajaran.

17. Menyusun laporan pelaksanaan pelajaran secara berkala.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Wakasek Urusan Kesiswaan

1. Menyiapkan administrasi penerimaan siswa baru.
2. Mengidentifikasi pendataan siswa secara baik.
3. Menyusun dan menyiapkan kepengurusan OSIS.
4. Melaksanakan pembinaan kesiswaan dalam urusan, Administrasi OSIS, Kepemimpinan dalam organisasi OSIS, Menyiapkan pemilihan siswa teladan.
5. Melaksanakan bimbingan dan pengarahan yang berhubungan dengan kedisiplinan dan tata tertib sekolah, bekerjasama dengan guru BP/BK, Pembina Gerakan disiplin sekolah, dan OSIS.
6. Mengkoordinir pemilihan siswa teladan.
7. Menyeleksi siswa yang ikut dalam paskibraka.
8. Membuat kartu pelajar.
9. Mengarahkan siswa untuk ikut pada kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler atau lomba-lomba peningkatan prestasi.
10. Menyiapkan siswa untuk mendapatkan beasiswa dan pertukaran siswa
11. Membuat laporan berkala dan insidentil
12. Mengelola mutasi siswa.
13. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan siswa secara berkala.
14. Bekerjasama dengan guru piket dalam hal mengurus ketertiban siswa.
15. Mengkoordinir pelaksanaan upacara.

16. Melaksanakan tugas lainya yang bersifat positif yang ditugasi oleh kepala sekolah.

17. Menyusun program pembinaan siswa / OSIS.

18. Melaksananakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan siswa /OSIS

19. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi.

20. Menyusun program dan jadwal pembinaan siswa / OSIS secara berkala.

21. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, dan ketaqwaan.

22. Melaksanakan pemilihan calon siswa eladan dan calon siswa penerima beasiswa.

23. Memilih siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah.

24. Terbinanya kegiatan sanggar MGMP/media.

25. Tersusunnya laporan pendayagunaan sanggar MGMP/media.

26. Terlaksananya pemilihan guru teladan.

27. Terbinanya kegiatan lomba-lomba bidang non akademis.

28. Mengatur mutasi siswa.

29. Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler.

30. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Wakasek Urusan Sarana dan Prasarana

1. Membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah di bidang sarana dan prasarana dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya.
2. Melakukan inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana baik yang berhubungan langsung dengan kelancaran KBM atau yang bersifat mendukung KBM.
3. Melakukan inventarisasi terhadap keberadaan sarana dan prasarana secara berkala untuk kemudian dilakukan pemilahan apakah barang itu layak pakai, habis pakai, dsb.
4. Melakukan pengendalian BOP dalam bidang sarana dan prasarana.
5. Menyiapkan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang dikelola oleh bagian tata usaha.
6. Melakukan koordinasi dengan para wakil kepala sekolah, unit organisasi/kerja dan atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan sekolah di bidang sarana dan prasarana.
7. Bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mengkoordinir pelaksanaan K7.
8. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan rehabilitasi atau pemeliharaan gedung, ruangan, halaman, mebeler, dll.
9. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah secara berkala

10. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan komite sekolah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas bidang sarana.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Wakasek Urusan Kemasyarakatan

1. Merencanakan program kerja.
2. Mengadakan kerjasama dengan komite sekolah atau orang tua/wali siswa
3. Membantu wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan social dan kegiatan-kegiatan lainnya.
4. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
5. Menginformasikan prestasi yang diraih keluarga besar sekolah melalui media masa.
6. Menampilkan profil sekolah melalui media internet.
7. Mengkoordinasikan kegiatan koperasi sekolah, dharma wanita serta kelompok usaha lain yang ada di sekolah.
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan HUT sekolah.
9. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat positif yang ditugasi oleh kepala sekolah

F. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator BK

1. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Membantu guru dan wali kelas dalam menghadapi kasus anak.
2. Membuat program bimbingan psikologi Menyusun dan mengarsip data kasus murid (konseling).

3. Memberikan penjelasan bersama dengan Kepala Sekolah tentang program dan tujuan pembimbingan kepada Wali Murid.
4. Membantu Wali Murid dalam memberikan layanan psikolog tentang perkembangan putra-putrinya Kordinasi dengan Wali Kelas dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi siswa tentang kesulitan belajar.
5. Melaksanakan koordinasi dengan wali kelas dan guru dalam menilai siswa bila terjadi pelanggaran yang dilakukan siswa dan dengan dinas terkait
6. Memberikan layanan bimbingan penyuluhan, karir kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar
7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait Penyusunan dan pemberian saran serta pertimbangan pemilihan jurusan Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan.
8. Mengadakan penilaian pelaksanaan BP/BK Melaksanakan *home visit* kepada siswa/orang tua siswa yang bermasalah setelah ditangani oleh wali kelas melalui home visit sebelumnya dan tidak ada perubahan.
9. Menyusun statistik hasil penilaian BP/BK Menyusun laporan pelaksanaan BK secara berkala.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap.
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.

3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir.
4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian.
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan.
6. Mengisi daftar nilai anak didik.
7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan, pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran.
8. Membuat alat pelajaran/alat peraga.
9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni.
10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum.
11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah.
12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran.
13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik.
14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran.
15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.
16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat.
17. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam pembelajaran
18. Melaksanakan pengembangan diri.

H. Tugas Pokok dan Fungsi Tata usaha

a. Fungsi Tenaga Administrasi Sekolah

Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 260 dan 261 Tahun 1996 Tugas pokok Kepala Tata Usaha sebagai berikut:

Melaksanakan Ketatata Usahaan Sekolah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Program Kerja tata usaha sekolah
2. Pengelolaan keuangan sekolah
3. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa
4. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah
5. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah
6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah
7. mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K
8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, pengurusan ketatausahaan secara berkala.

b. Tugas dan Fungsi Bendahara

Melaksanakan seluruh Administrasi Keuangan Sekolah, meliputi keuangan rutin/UYHD/BOPS, Dana BOS, Dana Komite Sekolah dan Dana dari sumber lainnya, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyimpan Dokumen, Rekening Giro atau Bank Keuangan sekolah
2. Mengajukan Pembayaran
3. Membuat Laporan Penggunaan Keuangan BOPS, BOS, Komite Sekolah dan sumber lainnya.
5. Melaksanakan Pengambilan dan Pengembalian serta pembayaran
6. Keuangan Negara sesuai petunjuk.
7. Menyimpan arsip/dokumen dan SPJ Keuangan

8. Membuat Laporan posisi anggaran (daya serap)
9. Membuat Lembar Hasil Waskat
10. Menjadi/ melaksanakan tugas kebendaharan dari setiap kepanitiaan yang dibentuk sekolah.
11. Membentuk Keuangan berdasarkan sumber keuangannya pada buku kas umum, dan buku kas pembantu.

c. Tugas Pokok Urusan Administrasi Kepegawaian

Melaksanakan Administrasi Kepegawaian, bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Mengisi Buku Induk Pegawai
2. Membuat DUK, R7/R6(F-3) dan DSO (F-1,2) guru atau pegawai
3. Membuat Daftar Prediksi Kenaikan Tingkat atau Golongan gaji Berkata Guru/Pegawai
4. Membuat dan mengajukan berkas usul permohonan kenaikan Gaji Berkala Guru atau Pegawai
5. Membuat Daftar hadir Guru dan Pegawai
6. Menyimpan Berkas data atau arsip Kepegawaian
7. Membuat SK Pembagian Tugas dan Surat Tugas
8. Membuat Daftar Gaji
9. Membuat Daftar Pembayaran Honorarium dan Kesejahteraan

d. Tugas Pokok Urusan Adminstrasi Kesiswaan

Melaksanakan Administrasi Kesiswaan, bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Membuat Daftar Nomor Induk Siswa
2. Mengisi Buku Klaper Siswa
3. Mengisi Buku Induk Siswa
4. Mengisi Buku Mutasi Siswa
5. Membuat Daftar Keadaan Siswa
6. Membukukan Daftar Keadaan Siswa
7. Membukukan Daftar Siswa perkelas
8. Mencatat Pendaftaran Siswa Baru
9. Membuat usulan peserta ujian
10. Menyimpan daftar Lulusan
11. Menyimpan Daftar Penerimaan atau penyerahan STTB
12. Menyimpan Daftar kumpulan nilai (leger)
13. Menyediakan Blanko Pemanggilan Orang Tua Siswa
14. Membuat Surat Keterangan dan surat mutasi siswa
15. Menyediakan Blanko izin keluar masuk kelas
16. Mengisi PAPAN data Kesiswaan Siswa.

8. Prestasi Peserta Didik SMP Negeri 13 Makassar

SMP Negeri 13 Kota Makassar yang merupakan juga sebagai salah satu sekolah faporit di kota Makassar maka tidak di pungkiri lagi berbagai prestasi yang telah di toreh dalam dunia pendidikan ini juga tidak lepas dari peranan kepala sekolah sebagai leader (Pemimpin) yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik serta peran serta para pendidik atau gurunya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal bagaimana melakukan

peningkatan dan pengembangan bakat dan potensi anak sehingga dapat berprestasi yang dapat mengharumkan nama sekolah sehingga SMP Negeri 13 Kota Makassar mempunyai tempat tersendiri dan memposisikan dirinya sebagai sekolah unggulan di kota Makassar pada khususnya dan Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya

Berikut uraian prestasi peserta didik SMP 13 Kota Makassar yang dapat kami uraikan melalui tabel :

Tabel 4.6
Daftar Prestasi Peserta didik SMP Negeri 13 Makassar

Tahun	Nama	Penghargaan	Peringkat	Jenis	Tingkat
2009	Lomba Menyanyi	Airlangga	2	Seni	Sekolah
2011	Modeling	Gereja Katolik	3	Seni	Kab/kota
2011	LOMBA PAWAI	-	4	Seni	Kecamatan
2011	MEWARNAI GAMBAR	-	1	Seni	Kab/kota
2011	FINGER PAINTING	-	3	Seni	Propinsi
2012	MEWARNAI GAMBAR	-	1	Seni	Sekolah
2012	Lomba Model	Philips	1	Seni	Kecamatan
2012	LOMBA PUZZLE	-	4	Sains	Sekolah
2012	Lomba Model	IPKAT	6	Seni	Kecamatan
2013	Lomba Matematika	Susu Zee	5	Sains	Sekolah
2013	Modeling	Mulia Bhakti	1	Seni	Sekolah
2014	-	DIKNAS BONE	3	Lain-lain	Kecamatan

Sumber dapodik Februari 2019 Tahun Ajaran 2018/2019

9. Profil Singkat Pejabat Kepala Sekolah dan Guru Mata Pelajaran PPKn

Profil Kepala Sekolah

1. Profil Kepala Sekolah

Nama : Drs Ramli M.Pd
NIP : 196611091996021002
NUPTK : 8441744647200043
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Magister Pendidikan (S2)

2. Profil Guru Pelajaran PPKn

Nama : Akbar Tanjung .S.Pd
NIP : 198102032006041006
NUPTK : 7535759660200022
Jabatan : Guru Mata Pelajaran PPKn Wakasek Kemasyarakatan
SMP Negeri 13 Makassar
Pendidikan : Sarjana Pendidikan (S1)

C. Temuan Penelitian

1. Respon Siswa/ Siswi SMP Negeri 13 Makassar Terhadap Pelajaran PPKn

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang terfokus pada pembentukan warga negara yang mampu memahami dan melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik, cerdas, terampil, dan berkarakter sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 untuk mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ternyata bukan sekedar kalimat Pancasila yang disirnakakan akan tetapi kandungan materi pelajaran tersebut

pun lebih banyak menyoroti masalah kewarganegaraan dan kurang mendalami isi butir-butir Pancasila.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam konteks kurikulum persekolahan mempunyai kedudukan yang amat penting dan strategis dalam rangka mengemban tugas pembinaan terhadap warganegara Indonesia dalam upaya membentuk Intellectual Citizenship. Konsekuensinya dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah harus membantu siswa dalam mengembangkan potensi serta kompetensi yang dimilikinya, baik potensi kognitif, afektif maupun perilaku dalam menghadapi lingkungan hidupnya, baik fisik maupun lingkungan social budayanya, sehingga menjadi warganegara yang baik, yaitu warganegara demokratis yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan sadar akan hak dan kewajibannya maka seorang warganegara diharapkan menjadi kritis, partisipatif dan bertanggungjawab.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang vital. Kenapa saya sebut vital ? menurut saya pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini juga berfungsi sebagai wadah bagi beberapa disiplin ilmu yang ada diantaranya hukum, sejarah, politik, dan juga sosial. Semua itu saling berkaitan satu sama lain, dan tidak berdiri sendiri-sendiri.

Namun pada saat ini, sangat disayangkan dikala moral pemuda yang semakin merosot, tindak kriminal terjadi dimana-mana, semakin maraknya

kasus KKN, dan ketidakadilan hukum yang semakin kentara, peran pendidikan kewarganegaraan juga diabaikan oleh pemuda-pemuda saat ini karena mereka berangapan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan atau mata pelajaran yang membosankan, mata pelajaran yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan mereka, dan bahkan ada juga yang berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang tidak penting dibandingkan dengan mata pelajaran lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa respon seseorang dalam menerima sesuatu pastinya akan berbeda beda ada yang tidak antusias pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, menerima dengan baik, merespon, menghargai dan bertanggung jawab terhadap tugas tugas yang di berikan guru. demikian pula dengan siswa/siswi SMP Negeri 13 Makassar dalam penerimaan atau respon mereka terhadap pelajaran khususnya pelajaran PPKn,

Oleh karena itu untuk dapat mengetahui keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar, seluruh faktor-faktor yang berhubungan dengan guru dan siswa harus dapat diperhatikan. Mulai dari perilaku guru dalam mengajar sampai dengan tingkah laku siswa sebagai timbal balik dari hasil sebuah pengajaran. Tingkah laku siswa ketika mengikuti proses belajar mengajar dapat mengindikasikan akan ketertarikan siswa terhadap pelajaran itu, atau sebaliknya siswa merasa tidak tertarik dengan pelajaran tersebut. Ketertarikan siswa inilah yang merupakan salah satu tanda-tanda minat.

Proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Aktivitas siswa di dalam kelas sangat beragam saat mengikuti proses belajar mengajar. Terkadang siswa yang tidak memperhatikan guru yang sedang memberikan penjelasan materi. Aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksudkan di sini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan siswa atas M Raditiya Maulana yang merupakan salah satu siswa kelas VII a SMP Negeri 13 Kota Makassar dengan memberikan pertanyaan

“Apakah anda menyukai pelajaran Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan” iya pak kami menyukai pelajaran PPKn” (wawancara pada tgl 29 Januari 2019 jam 09 pagi)

Demikian pula dengan wawancara kami dengan siswi atas nama Magfira Aulyah Wahyudi yang juga merupakan Siswi kelas VII SMP Negeri 13 Makassar dengan memberikan pertanyaan yang sama yaitu :

“Apakah anda menyukai pelajaran Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan” iya pak kami senang dan menyukai pelajaran PPKn” (wawancara pada tgl 29 Januari 2019 jam 09 pagi)

Dari hasil wawancara tersebut di atas dengan siswa ini menggambarkan bahwa siswa/siswi SMP Negeri 13 Kota Makassar menyukai dan senang terhadap pelajaran PPKn. Tentunya hal ini merupakan tantangan kembali kepada peneliti untuk menggali lagi informasi tentang apa yang mengakibatkan siswa/siswi SMP Negeri 13 Makassar bisa suka dan menyenangkan pelajaran PPKn.

Tentunya hal ini ada sesuatu yang bagus karena dengan sikap menyukai suatu pelajaran ini merupakan awal yang baik dalam memulai proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan siswa/siswi sebagai sesuatu yang penting dalam setiap rangkaian pembelajaran.

Pemahaman siswa terhadap pembelajaran PPKn dapat dilihat melalui tingkah laku siswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Siswa dapat menjelaskan arti dari nilai-nilai Pancasila menurut pemahaman mereka masing masing sesuai yang diajarkan oleh guru dalam mata pelajaran PPKn serta bisa menyebutkan contoh penerapan nilai Pancasila di lingkungan sekolah.

Proses pelaksanaan pembelajaran PPKn yang memuat nilai-nilai Pancasila terdiri dari beberapa indikator yaitu interaksi guru dengan siswa, interaksi siswa dengan siswa, realisasi penugasan serta pengelolaan kelas

Interaksi guru dengan siswa terjadi ketika guru mengucapkan salam kepada siswa dan berdoa beserta membaca Asmaul Husna sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan dimulai dengan

apersepsi yang kemudian dilanjutkan guru dengan menuliskan indikator dan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui apa saja yang harus mereka kuasai. Kegiatan inti pada tahap eksplorasi diisi dengan penyampaian materi pokok oleh guru yang memuat nilai-nilai Pancasila yang diintegrasikan pada sub materi beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami siswa. Tidak hanya dalam pemberian materi siswa ditanamkan nilai-nilai Pancasila, namun juga lebih ditekankan pada sikap siswa ketika mengikuti pembelajaran PPKn di kelas sehingga tidak hanya secara kognitif tetapi diharapkan juga dalam segi afektif dan psikomotor.

Dalam tahap elaborasi siswa diberikan tugas diskusi kelompok untuk memahami materi PPKn yang memuat nilai-nilai Pancasila. Pada tahap konfirmasi siswa/Siswi diberi kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya yang bertujuan agar siswa dapat belajar menghormati hak dan pendapat orang lain.

Menurut siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Makassar Melalui Wawancara tentang definisi nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai luhur yang timbul dari bangsa Indonesia sebagai ideologi, pedoman dan pandangan hidup masyarakat; atau nilai nilai yang digunakan sebagai ideologi Negara yang berisi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Dari definisi yang dijelaskan siswa serta beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang telah disebutkan tersebut dapat membuktikan

bahwa siswa kelas VIII SMP Negeri 13 Makassar sudah paham dan mengerti juga menerapkan nilai-nilai Pancasila yang telah diajarkan guru dalam pembelajaran PPKn Mulai dari sila kesatu hingga sila kelima Pancasila.

Persepsi siswa terhadap pembelajaran nilai-nilai Pancasila yang telah diajarkan oleh guru merupakan salah satu bukti bahwa guru PPKn di SMP Negeri 13 Makassar telah mengimplementasikan pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan meskipun masih belum terlaksana secara maksimal dan belum menyeluruh Siswa dan Siswi memahami akan pentingnya pelajaran PPKn dalam membentuk karakter bangsa Indonesia dan sebagai mata pelajaran pengenalan ideology bangsa.

2. Faktor faktor Yang Mempengaruhi Siswa/Siswi SMP Negeri 13 Makassar Terhadap Pelajaran PPKn

Berkaitan dengan hal tersebut diatas tentang respon Siswa terhadap pelajaran khususnya pelajaran PPKn tentunya ini berkaitan erat dengan hal hal atau faktor yang mempengaruhi siswa / siswi dalam mengikuti dan memahami pelajaran PPKn.

Dalam proses belajar, minat sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak memiliki minat belajar, tidak mungkin melakukan aktivitas belajar. Minat adalah "gejala yang tertarik pada sesuatu yang selanjutnya minat seseorang akan mencerminkan tujuannya". Apabila siswa yang berminat terhadap suatu pelajaran tertentu dapat dilihat dan diamati partisipasinya dalam menekuni pelajaran tersebut. Minat ini memegang peranan penting

dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya minat maka ia tidak dapat menguasai pelajaran yang diberikan gurunya

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa, minat merupakan salah satu faktor dalam memperoleh hasil belajar. Sebab tanpa adanya minat yang tinggi, siswa merasa terpaksa dan terbebani dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, di samping ini proses belajar akan terwujud bila dalam dirinya terdapat keseriusan. Begitu juga kondisi fisiologis berupa kesehatan, semangat dan potensinya yang normal. Akan tetapi semua ini tidak berjalan dengan normal, seperti terganggunya kesehatan, mudah pusing atau adanya kelainan-kelainan alat indera atau tubuhnya, maka tidak dapat membangkitkan minat belajar dengan baik. dapat disimpulkan bahwa rendahnya minat siswa mempengaruhi aktivitas belajar anak dalam memahami pelajaran yang akan di pelajari.

Faktor - faktor yang mempengaruhi secara garis besar dibagi dua yaitu

1. Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri anak yaitu sendiri. Seperti kesehatan, rasa aman, kemampuan minat dan sebagainya
2. Faktor Exsternal, ialah faktor yang dari luar diri si anak Seperti kebersihan rumah, udara yang panas, lingkungan dan sebagainya

Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa untuk semua pembelajaran ini berlangsung masalah yang ditemukan antara lain strategi pembelajaran yang digunakan kurang sesuai. Hal ini mengakibatkan peserta didik merasa jenuh atau bosan bahkan tidak bisa konsentrasi dalam

mengikuti pembelajaran sehingga dapat menyebabkan menurunnya minat belajar.

Hal-hal yang dapat mempengaruhi minat dan ketertarikan siswa atau siswi terhadap pelajaran PPKn yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1. Kondisi Siswa

Suasana hati (mood) yang baik. Ketika siswa sedang merasakan suasana hati yang tidak menyenangkan karena berbagai perasaan negatif (sedih, tertekan, kecewa, atau marah, sakit), tentu saja ia akan merasakan kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar.

2. Kemampuan Daya Intelektual

Kemampuan dasar intelektual yang rendah dapat menyebabkan siswa susah untuk mengerti materi yang diajarkan. Hal ini sama seperti sebuah pepatah mengerti tidak, bingung iya

3. Motivasi

Ketika siswa memiliki minat untuk belajar dan didukung oleh motivasi, sudah bisa dipastikan bahwa siswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan belajar pada saat pembelajaran berlangsung. Tetapi jika siswa kurang berminat dalam belajar karena tidak ada motivasi dalam diri siswa sendiri. Selain itu siswa mengetahui manfaat apa yang ia mempelajari materi yang akan diajarkan. Sudah pasti siswa akan memotivasi diri sendiri untuk belajar dengan giat di kelas

4. Kebiasaan Belajar

Setiap siswa memiliki gaya belajar atau kebiasaan belajar yang berbeda-beda. Jika guru tidak memperhatikan gaya belajar siswanya, tentunya guru tidak akan berhasil membangkitkan minat belajar siswa. Selain itu kebiasaan belajar yang salah (belajar hanya pada waktu akan ada ulangan) memungkinkan prestasi belajar yang dicapai siswa rendah.

Kemudian Kondisi tentang sikap atau karakter yang kurang dikalangan siswa serta pengaruh dari luar sekolah adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya kesenjangan sikap antara senior kelas dengan adik kelas belum terjadi.
2. Masih sering terjadi perkelahian antara senior dengan adik kelas.
3. Berkembangnya media sosial dan medsos yang lain yang lebih menarik di banding pelajaran PPKn
4. Tidak adanya kegiatan atau perlombaaan di bidang mata pelajaran PPKn
5. Kemudian faktor dari siswa seperti tidak ada semangat dari dalam diri siswa itu sendiri untuk menjadi yang terbaik, kurangnya motivasi atau dorongan bagi siswa baik dari guru, orang tua maupun teman-temannya, kurangnya komunikasi yang terjalin akrab antara siswa dan guru.

b. Faktor Eksternal

1. Kondisi Guru

Seperti yang kita ketahui Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib mulai dari SD, SMP dan SMA. Semenjak SD kelas 1 kita sudah mulai diperkenalkan oleh pelajaran PPKn mulai dari pelajaran dasar yang tentunya mudah dipahami seperti pelajaran tenggang rasa, percaya diri, toleransi dan sebagainya. Semakin meningkat tingkat pendidikan maka maka pelajaran pendidikan kewarganegaraan pun semakin rumit karena banyak sekali materinya.

Seorang guru yang ingin mengajar hendaknya menguasai bahan yang akan disajikan. Dengan menguasai bahan yang akan disajikan itu menimbulkan keaktifan bagi guru dalam memberikan materi pelajaran yang di ajarkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan menguasai bahan guru memperoleh beberapa manfaat yaitu :

1. Guru dapat membuat perencanaan pelajaran dengan baik
2. Guru dapat memikirkan varieasi metode yang akan dipakai
3. Guru dapat memecahkan persoalan dan membatasi bahan
4. Guru dapat membimbing murid kearah tujuan yang diharapkan

Selain itu guru juga hendaknya menguasai Penerapan metodologi juga sangat mempengaruhi proses mengajar, karena walaupun guru menguasai bahan yang akan diajarkan kalau tidak menguasai tehnik penyajian atau kurang mengetahui metode menyajikan bahan itu kepada murid maka kurang membawa hasil

yang diharapkan. Demikian juga kalau hanya menyajikan bahan pelajaran dengan menggunakan satu metode dapat mengakibatkan murid-murid menjadi bosan.

Dari sebuah wawancara dengan Fildzuh Aliyah salah satu siswi di SMP Negeri 13 Makassar ia memberikan komentar bahwa mengenai cara membawakan materi oleh guru PPKn nya ia mengatakan bahwa

“Bahwa guru PPKn nya sangat menguasai materi yang ia bawakan dan cara menyajikan sangat santai sehingga kami tidak tertekan sehingga kami tidak segang untuk bertanya”(wawancara pada tanggal 6 Februari 2019 jam 12.00)

Oleh karena itu guru harus mengetahui berbagai metode mengajar dan mampu menerapkan prinsip mengajar dalam proses mengajar, jadi penerapan metode mengajar ini merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Penggunaan alat peraga dalam mengajar juga sangat besar pengaruhnya karena dapat menarik perhatian dan membangkitkan semangat atau motivasi atau aktivitas murid terhadap apa yang diajarkan oleh guru, Pada waktu guru mengajar di depan kelas harus berusaha menggunakan alat peraga. Baik dengan menggunakan benda-benda aslinya atau dengan barang tiruan. Juga boleh dengan benda-benda tiruan. Juga boleh menggunakan media lainnya seperti radio, tape recorder, video dan sebagainya. Dengan menggunakan alat-alat tersebut dapat membantu guru menjelaskan pelajaran yang diberikan dan membantu murid untuk membentuk pengertian dalam jiwanya, dengan demikian dalam

mengajar dengan menggunakan alat peraga ini akan lebih menarik perhatian anak dan lebih merangsang anak untuk berfikir

Sehingga Dengan demikian seseorang guru harus senantiasa berusaha agar tetap membangkitkan minat anak didiknya. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa titik permulaan dalam mengajar yang berhasil adalah membangkitkan motivasi anak didik. karena dengan cara ini merangsang anak untuk meningkatkan semangat mereka dalam mempelajari mata pelajaran yang disajikan oleh gurunya

Dalam sebuah wawancara dengan salah satu siswa kelas VII SMP Negeri 13 Makassar yang bernama Moh Rifqi Ramadhan memberikan komentarnya terhadap peranan guru dalam memberikan motivasi dan minat belajar sebagai berikut :

“Bahwa peranan guru dalam memberikan motivasi kepada siswa sangat di harapkan sehingga siswa sangat berminat dalam mengikuti pelajaran PPKn dan guru harus mampu menghadirkan suasana belajar yang nyaman” (wawancara Pda Tgl 6 februari 2019 Jam 12.00 waktu istirahat)

Peran guru hendaknya menjaga aturan kelas dan menjadikan murid bergairah menerima pelajaran serta mengembangkan bakat anak didik dan hendaknya mengarahkan kelakuan murid kepada yang baik yang diinginkan dengan suka rela dan kemauannya sendiri. Jalan kearah itu adalah membangkitkan minat motivasi dengan berusaha memenuhi keperluan mereka serta mengarahkannya kepada yang benar.

Hal ini diduga berkaitan dengan faktor karakteristik ataupun kepribadian guru pendidikan kewarganegaraan pada saat mengajar di kelas, faktor dari siswa dan sekolah yang menyebabkan sikap siswa cenderung tidak antusias. Faktor dari guru seperti pembuatan materi pembelajaran dan proses pembelajaran kurang bervariasi sehingga kesannya membosankan akan berpengaruh pada sikap siswa, penggunaan media pembelajaran yang kurang tepat membuat siswa tidak fokus pada media tersebut dan apa yang sedang diberikan guru, pemilihan metode mengajar yang kurang tepat akan menyebabkan sikap siswa tidak memperhatikan pembelajaran.

Peran guru sebagai mediator, katalisator, motivator sangat penting. Oleh karena itu guru bisa saja menjadi penyebab siswa malas belajar. Meskipun pada dasarnya siswa suka terhadap materi pelajaran yang diajarkan tetapi apabila guru tidak mampu mengajar sesuai yang diharapkan oleh siswa maka akan memunculkan rasa malas belajar. Guru harus bisa menjawab semua pertanyaan siswa dengan logis, memberikan informasi baru tentang pelajaran yang diajarkan, memberikan motivasi belajar dan lain sebagainya.

Hal ini membuktikan bahwa peranan guru sangat menunjang dalam membangkitkan minat siswa dan siswi dalam hal menyukai pelajaran yang di bawakan oleh guru dan dapat menciptakan suasana belajar kelas menjadi nyaman dan menyenangkan sehingga proses belajar mengajar di dalam kelas dapat berjalan lancar.

2. Kondisi Keluarga

Bukan suatu jaminan rumah mewah dan megah membuat anak menjadi rajin belajar, tidak pula rumah yang sangat sederhana menjadi faktor mutlak anak malas belajar. Rumah yang tidak dapat menciptakan suasana belajar yang baik adalah rumah yang selalu penuh dengan kegaduhan, keadaan rumah yang berantakan ataupun kondisi udara yang pengap. Selain itu tersedianya fasilitas-fasilitas permainan yang berlebihan di rumah juga dapat mengganggu minat belajar anak. Mulai dari radio tape yang menggunakan kaset, CD, VCD, atau komputer.

Kondisi seperti ini berpotensi besar untuk tidak terciptanya suasana belajar yang baik. dan Sikap orang tua yang tidak memberikan perhatian dalam belajar atau sebaliknya terlalu berlebihan perhatiannya, bisa menyebabkan anak malas belajar. Tidak cukup di situ, banyak orang tua di masyarakat kita yang menuntut anak untuk belajar hanya demi angka (nilai) dan bukan mengajarkan kepada anak akan kesadaran dan tanggung jawab anak untuk belajar selaku pelajar. Akibat dari tuntutan tersebut tidak sedikit anak yang stress dan sering marah-marah sehingga nilai yang berhasil ia peroleh kurang memuaskan. Parahnya lagi, tidak jarang orang tua yang marah-marah dan mencela anaknya bilamana anak mendapat nilai yang kurang memuaskan. Menurut para pakar psikologi, sebenarnya anak usia Sekolah Dasar dan sampai sekolah menengah atas jangan

terlalu diorientasikan pada nilai (hasil belajar), tetapi bagaimana membiasakan diri untuk belajar, berlatih tanggung jawab, dan berlatih dalam suatu aturan.

Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan kordinator BK (Bimbingan dan Konseling) ibu Radiawati.S.Pd. beliau mengatakan

“Bahwa berdasarkan pengalaman saya sebagai guru BK salah satu penyebab kesulitan belajar anak diakibatkan karena faktor keluarga, baik itu karena orang tuanya sudah berpisah atau seringnya melihat orang tuanya bertengkar” (wawancara tgl 07 Februari jam 10 pagi)

ketika ada masalah di keluarga pasti akan terbawa pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga untuk konsentrasi dengan mata materi yang diajarkan terlalu sulit di pahami.

Oleh karena itu peranan keluarga khususnya kedua orang tua sangat berperan penting dalam meningkatkan minat anak dalam belajar. Dalam mencapai prestasi belajar yang baik dan optimal dibutuhkan peran serta orang tua dalam membina dan membimbing anak dalam belajar sedangkan Sedangkan lingkungan sekolah memegang peranan penting bagi perkembangan belajar pada siswa yang meliputi lingkungan fisik sekolah seperti lingkungan sekolah, sarana dan prasarana yang ada. Sumber-sumber belajar, media belajar, dan sebagainya

3. Kaadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi orang tua maupun pendidikan orang tua yang rendah, mengakibatkan kebanyakan orang tua menyerahkan

sepenuhnya tanggung jawab belajar anak kepada pihak sekolah sedangkan keberhasilan anak juga dibutuhkan peranan orang tua.

Berdasarkan pengamatan peneliti dari beberapa kasus anak menjadi putus sekolah disebabkan karena masalah ekonomi yang dimana anak-anak harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah sehingga ini menjadi suatu kebiasaan anak sehingga anak sudah tidak berfikir lagi untuk melanjutkan pendidikan.

Tingkat ekonomi keluarga, termasuk dalam kategori rendah menyatakan bahwa ekonomi orang tua dapat memberikan pengaruh terhadap sebagian orang tua yang tidak memiliki penghasilan yang cukup

Tinggi. Mereka lebih terarah kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti sandang, pangan dan papan, sehingga anak merasa minder untuk bersekolah karena orang tua tidak memiliki pendapatan yang cukup tinggi.

Anak-anak dari keluarga miskin tidak dapat membeli alat persekolahan yang memadai di banding anak yang mempunyai orang tua yang berpenghasilan tinggi, maka dengan alat serba tidak lengkap inilah maka hati anak – anak kecewa, mundur, putus asa sehingga dorongan belajar mereka kurang. dengan demikian, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa betapa pentingnya orang tua memiliki kondisi ekonomi yang baik karena dapat mempengaruhi kelangsungan pendidikan anaknya

4. Keadaan Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab kesulitan belajar, ketika lingkungan mendukung serta faktor lain mendukung, pasti pembelajarannya akan berhasil, tetapi ketika lingkungan dalam keadaan suasana yang tidak baik, maka akan terjadi kesulitan memahami materi. Siswa akan merasa nyaman belajar ketika keadaan lingkungannya dalam keadaan tenang, dan tidak kotor sehingga mendukung untuk proses belajar mengajar. Hal ini didukung oleh hasil penelitian siswa mengalami kesulitan belajar, salah satu faktor karena lingkungannya, pada saat proses belajar mengajar kadangkala ada siswa yang menanggapi materi dengan penuh perhatian dan ada pula siswa yang hanya bercerita, sehingga berdampak kepada siswa yang memiliki perhatian untuk belajar, konsentrasinya terganggu dan menyebabkan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar

Dalam sebuah wawancara dengan bapak akbar tanjung S.Pd selaku guru PPKn di SMP Negeri 13 Makassar beliau mengatakan bahwa

“Bahwa sering di dapati anak yang apabila saya menjelaskan materi hanya ngobrol dan tidak memperhatikan materi yang saya bawa sehingga saya memberikan hukuman untuk berdiri di depan sehingga ini memberikan efek kepada siswa yang lain” (wawancara tanggal 07 Februari 2019 jam 11 Pagi)

Tujuan utama dari pemberian hukuman umumnya, untuk meminimalisir adanya pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hukuman ini dimaksudkan agar siswa berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan pada

siswa sebaiknya bersifat mendidik. Siswa harus tetap dapat merasakan adanya manfaat bagi mereka dari hukuman yang diberikan tersebut.

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar. Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai empirik yang berarti pengalaman, karena dengan lingkungan itu individu mulai mengalami dan mengecap alam sekitarnya. disimpulkan bahwa, pengertian pengaruh di lingkungan dapat diartikan tempat dimana seseorang mendapat berbagai macam pengaruh baik maupun buruk yang dapat mengubah karakter yang sebelumnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan itu, karena lingkungan itu senantiasa tersedia di sekitarnya.

Lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap anak baik dari lingkungan keluarga maupun dari lingkungan disekitar nya Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih sebagai kebiasaan yang baik tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesopanan dan moral. Disamping itu mereka di tanamkan keyakinan-keyakinan yang penting utamanya hal-hal yang bersifat

religious sehingga apabila di lingkungan keluarga kuat maka pengaruh pengaruh dari lingkungan sekitar dapat di atasi dengan baik.

Ini senada dengan hasil wawancara dengan ibu Radiawati.S.Pd selaku guru BK (Bimbingan dan Konseling) tentang bagaimana menghindarkan anak dari pengaruh narkoba dan hal hal negatif lain beliau mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa kami telah mengadakan kerjasama dengan pihak BNN Provinsi Sulsel dengan melakukan kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya Narkoba yang dilakukan di awal semester tahun pelajaran” (wawancara tgl 07 Februari 2019 jam 11.30 Pagi)

Hal ini sangat penting sekali dan bernilai positif karena dengan kegiatan ini siswa dan siswi dapat mengetahui bahaya dan pengaruh negative terhadap siswa dan mempengaruhi prestasi siswa. Oleh karena itu peranan orang tua sangat di perlukan dalam melakukan pengawasan terhadap anak mulai dari pergaulan anak kepada siapa ia berteman dan posisi dia berada dalam lingkungan yang bagaimana.

3. Solusi Solusi Dalam Meningkatkan Minat Siswa/ Siswi SMP Negeri 13 Makassar Terhadap Pelajaran PPKn

Faktor dari luar adalah kurangnya perhatian dan motivasi dari orang tua untuk mendorong anaknya dalam belajar. Orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan pada guru dan orang tua sibuk dengan mencari nafkah. Kondisi lingkungan yang tidak baik dalam kelas yang ribut membuat siswa kesulitan memahami penjelasan guru. Lingkungan keluarga pun turut andil dalam rendahnya minat belajar anak. Karena seorang anak tidak akan pernah jauh dari yang namanya bermain. Jika lingkungannya

mendukung untuk anak bermain terus, tentunya belajar akan menjadi kegiatan yang sangat membosankan bagi siswa tersebut

Salah satu upaya untuk menciptakan minat belajar siswa adalah motivasi dari orang tua, guru dan lingkungannya. Motivasi sangat mendukung berhasilnya siswa dalam proses belajar mengajar. Semakin guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyarankan sebagai berikut

- 1) Guru disarankan untuk meningkatkan profesionalisme dalam mengajar agar tercipta kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Yaitu siswa dapat belajar dengan senang dan nyaman. Sehingga dapat membangkitkan minat belajar siswa.
- 2) Siswa disarankan agar lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi yang memuaskan siswa, guru, serta orang tua siswa.
- 3) Sekolah diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran disekolah.
- 4) Pihak sekolah di harapkan membuat ajang atau perlombaan khususnya di pelajaran PPKn sehingga siswa siswi menganggap pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa yang lebih baik.

Terkait masalah solusi pemecahan masalah di atas peneliti menanyakan kepada bapak akbar tanjung.S.Pd selaku guru PPKn dengan pertanyaan bagaimana cara mengatasi anak yang malas untuk belajar dan beliau mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa dengan belajar PPKn siswa akan merasa bosan sehingga saya sebagai guru berupaya semaksimal mungkin menciptakan suasana belajar yang nyaman serius tapi santai sehingga anak mudah berfikir dalam diskusi di dalam kelas” (wawancara tanggal 07 Februari 2019 jam 10 pagi)

Peranan seorang guru sangat penting untuk menjadikan peserta didik dalam menghadapi persaingan di dunia pekerjaan dan menjadikan mereka sebagai lulusan yang berhasil dalam menghadapi kompetensi atau ketuntasan belajar. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan strategi bagi pengajar supaya peserta didik dapat belajar secara efektif dan efisien. Pola lama dengan pembelajaran klasikal seperti dilakukan oleh banyak guru sampai sekarang ini bukanlah strategi yang tepat untuk lagi di terapkan pada proses pembelajaran. Apabila pola tersebut masih diterapkan maka peserta didik akan merasa jenuh, tidak ada semangat untuk menerima pelajaran. Akibatnya, tidak akan menumbuhkan minat, bakat, potensi maupun kreatifitas peserta didik.

Guru perlu menyajikan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik, bertujuan agar terpenuhinya suatu kompetensi dan profesionalisme guru dalam mengajar. Teknik penyajian dan pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dikuasai guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran atau menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik di dalam kelas, agar

pelajaran tersebut dapat ditangkap, di pahami, dimengerti dan digunakan oleh peserta didik dengan baik. semuanya harus disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta waktu yang diperlukan dalam mencapai ketuntasannya.

B. Penguatan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Negeri 13 Makassar

1. Penerapan Kebijakan Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Kota Makassar

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Adapun kurikulum yang diberlakukan pada saat ini yaitu kurikulum 2013. kurikulum ini berlaku dalam Sistem Pendidikan Indonesia dan merupakan kurikulum tetap dan telah diterapkan oleh pemerintah, Selain itu, Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2006 (KTSP).

Kurikulum 2013 merupakan sistem pendidikan baru yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang berlaku kurang lebih 6 tahun sejak 2006. di tahun 2013, kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di beberapa sekolah

Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek sikap dan perilaku. Masing-masing aspek memiliki tujuan tersendiri. Seperti pada aspek pengetahuan, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan/wawasan dalam segala mata pelajaran. Kemudian pada aspek keterampilan, yang bertujuan untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam membuat, melaksanakan dan mengerjakan soal-soal hingga peserta didik terlatih secara ilmiah. Pada aspek sikap dan perilaku juga memiliki tujuan yang tidak kalah penting yaitu mengajarkan sikap yang baik dan berakhlakul karima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013, Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap selama 7 tahun sejak aturan itu disahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan perbaikan terhadap Kurikulum 2013. Setiap perbaikan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah terhadap kurikulum dari waktu ke waktu bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki tiga kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hasil perbaikan

1. Penataan kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada semua mata pelajaran.
2. Koherensi KI-KD dan penyesuaian dokumen Pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum.
3. Penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir

Ketentuan pembelajaran sikap spiritual dan sikap sosial setelah perbaikan kurikulum Pada mata pelajaran Pendidikan Agama-Budi Pekerti dan mata pelajaran PPKn, pembelajaran sikap spiritual dan sosial dilaksanakan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung

Hasil wawancara terhadap kepala sekolah SMP 13 Kota Makassar bapak Drs Ramli,M.Pd tentang kebijakan Kurikulum 2013 di mana beliau mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa penggunaan kurikulum 2013 atau biasa di sebut dengan K13 yang diterapkan di satuan pendidikan diseluruh Indonesia dan kami terapkan juga di SMP Negeri 13 merupakan kebijakan yang bagus untuk pembelajaran di sekolah menengah pertama karena sifat dari K13 itu sendiri adalah student center sehingga anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan saling bertukar pikiran baik dengan teman nya maupun dengan gurunya itu sendiri” (Wawancara tgl 28 januari 2019 jam 10 pagi selesai upacara bendera)

Sesuai instruksi Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, Bambang Winarji mengatakan, pada tahun 2018 seluruh sekolah sudah harus menerapkan Kurikulum 2013 beliau sampaikan. dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017 - 2018 dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Selasa (12/12/2017).

Berdasarkan warta diatas ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertuan didalam UUD 1945

Dalam sebuah wawancara lain di ruang kelas dengan bapak akbar tanjung S.Pd yang merupakan guru mata pelajaran PPKn beliau

memberikan komentar mengenai pengimplementasian Kurikulum 2013 atau biasa disebut K13 khususnya untuk mata pelajaran PPKn dimana

beliau mengatakan sebagai berikut :

“ Bahwa penggunaan K13 khususnya untuk mata pelajaran PPKn sangat membantu guru dan memberikan ruang untuk siswa untuk berfikir kritis dalam mengolah potensi diri” (Wawancara tgl 29 januari 2019 jam 10 pagi diruang kelas VIIb)

Pada kesempatan yang sama pula pak akbar tanjung S.Pd juga Menambahkan komentarnya bahwa :

“Pemahamannya mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu bhwa pelaksanaan kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yaitu KTSP 2006 (wanwacara Pada Tgl 29 januari 2019 Jam 10 Pagi Di ruang Kelas VIIb)

Dengan demikian hal di atas menunjukkan bahwa Guru PPKn memiliki ekspektasi yang besar terhadap pembelajaran PPKn dengan menggunakan metode kurikulum 2013 (K13) karena Kurikulum ini khususnya dalam pembelajaran PPKn sangat relevan dengan tujuan PPKn yaitu mengutamakan pembentukan sikap ,pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan dalam proses pembelajaran yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa (*Student Central Learning*).

Untuk menyukseskan implementasi kurikulum 2013 harus dimulai dengan peningkatan kualitas guru, yang sampai saat ini masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini penting, karena kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran adalah kemampuan profesional guru. Castetter menegaskan bahwa “kualitas pembelajaran sangat di pengaruhi oleh kemampuan professional guru gurunya.

Guru merupakan faktor penentu, mereka ialah ujung tombak implementasi kurikulum dan pembelajaran yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru sadar bahwa dalam melaksanakan tugasnya selalu dituntut untuk bersungguh-sungguh dan harus menyadari bahwa yang dianggap baik dan benar saat ini, belum tentu benar dimasa yang akan datang. Sehingga guru dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan dalam rangka melaksanakan tugas profesinya.

Implementasi kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, memerankan guru sebagai pembentuk karakter dan kompetensi peserta didik, yang harus kreatif dalam memilih dan memilih, serta mengembangkan metode dan materi pembelajaran. Guru harus profesional dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik sesuai dengan karakteristik individual masing-masing, dan harus tampil menyenangkan dihadapan peserta didik dalam kondisi dan suasana yang bagaimanapun.

Dalam sebuah wawancara dengan bapak Akbar tanjung.S.Pd SMP Negeri 13 Makassar mengenai bagaimana membuat rasa nyaman terhadap siswa untuk belajar.beliau mengatakan.

“Bahwa dengan membuat suasana menjadi nyaman dan tanpa tekanan maka komunikasi antara siswa dan guru dapat terjalin dengan baik sehingga materi yang saya sampaikan mudah di pahami,saya sering menyampaikan materi dengan menggunakan bahasa mereka sehingga materi dapat diserap dengan baik.(wawancara pada tgl 29 Januari 2019 jam 12 .00 waktu istirahat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa siswa yang di ajar oleh bapak akbar tanjung merasa senang dan antusias hal ini

juga di buktikan dengan wawancara dengan beberapa siswa / siswi yang duduk di kelas VII SMP Negeri 13 yang memberikan jawaban yang senada.

2. Pemahaman Guru PPKn tentang Kebijakan Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi dan sistem pendukung (Joice&Wells). Sedangkan menurut Arends dalam Trianto, mengatakan “model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas.

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap sesuatu. Seseuatu yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan kurikulum 2013. Tujuan daripada dilaksanakannya kurikulum ini ialah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.

Hasil wawancara oleh salah satu guru yang mengajarkan mata pelajaran PPKn yang bernama Akbar Tanjung.S.Pd menjelaskan bahwa :

“ Bahwa pelaksanaan kurikulum 2013 peserta didik diharapkan lebih pro aktif dalam proses pembelajaran demi mengupayakan peningkatan mutu pendidikan” (...). Bahwa pelaksanaan kurikulum ini lebih mendukung peserta didik lebih aktif dibandingkan guru, dan dapat melatih peserta didik berpikir kritis dalam bersosialisasi dengan kehidupan saat ini. Sehingga dengan adanya pelaksanaan kurikulum ini para guru PPKn sangat menyetujui (merespon) (wawancara tgl 01 februari 2019 Jam 12 Siang)

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlangsung secara terus menerus seiring dengan perkembangan zaman yang tidak pernah berhenti, dan selalu memunculkan hal-hal baru dalam kehidupan. Guru harus mengikuti perkembangan tersebut sehingga lebih dahulu mengetahuinya daripada peserta didik dan masyarakat umumnya. Bagi guru-guru yang bertugas di wilayah perkotaan, dimungkinkan mereka banyak tertinggal oleh peserta didiknya, karena anak-anak di perkotaan sudah terbiasa dengan teknologi seperti komputer dan internet. disinilah letaknya perkembangan dan tanggung jawab guru terhadap profesinya, menuju guru profesional dan bermutu.

Pelaksanaan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi dan karakter (competency and character based curriculum), diharapkan dapat membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman, serta perkembangan teknologi dan seni, guna menjawab tantangan arus globalisasi terhadap berbagai perubahan. Maka yang dikatakan oleh bapak akbar tanjung.S.Pd sepakat bahwa pelaksanaan dengan k13 ini lebih memacu anak-anak untuk percaya diri, mencari jati diri mereka sendiri tanpa bergantung, dan memiliki jiwa-jiwa kritis.

Pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan ini, tentunya melihat perkembangan yang semakin pesat, bahwa tujuannya pemerintah membuat (kurikulum 2013) bagaimana lebih baik dari pada kurikulum sebelumnya, karena pada tatanan konsep kurikulum 2013 sudah cukup bagus. Selain itu bapak akbar tanjung berpendapat

“Saya masih tetap bahkan mungkin saya berani mengatakan mungkin satu diantara guru PPKn di kota Makassar yang masih menyuruh peserta didik menghafal UUD 1945 dan nilai-nilai pancasila itu mungkin saya dan itu wajib dihafal bagaimana mau menjadi warga Negara yang baik kalau dasar negaramu kamu tidak tahu.(wawancara tgl 01 februari 2019 jam 12.00 siang)

Berdasarkan hasil wawancara mulai dari bapak kepala sekolah bapak Drs Ramli,M.Pd dan terutama bapak Akbar tanjung S.Pd sebagai guru mata pelajaran PPKn sangat paham dengan konsep Kurikulum 2013 sehingga peneliti menarik kesimpulan di SMP Negeri 13 Kota Makassar Makassar sudah menerapkan Kurikulum 2013 pada semua mata pelajaran khususnya di pada mata pelajaran PPKn hal ini juga tergambar pada pada penjelasan dan hasil wawancara guru mata pelajaran PPKn bapak Akbar tanjung.S.Pd dan Informan yang lain.

3. Nilai-nilai yang telah dikembangkan dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar

a. Nilai – nilai Pancasila

Pengembangan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- 1) Tahap perencanaan memperhatikan aspek dasar acuan, materi pengembangan, sumber pengembangan, media dan teknik/pendekatan yang digunakan untuk pengembangan nilai-nilai Pancasila. Untuk teknik/pendekatan yang digunakan dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila belum bervariasi. Nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan yaitu nilai kereligiusan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan.

Nilai tersebut belum mencakup secara keseluruhan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

- 2) Tahap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PKn dengan memberikan pengarahannya dan bimbingan sebagai bentuk komitmen dalam mendidik peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti: 1) menanamkan nilai-nilai religiusitas misalnya shalat berjamaah, dan adanya koperasi untuk melatih siswa akan nilai kejujuran, 2) mengikuti organisasi PMR, menjenguk teman yang sakit, saling tolong menolong dan menghargai sesama manusia, 3) upacara bendera, kerja bakti bersama, 4) musyawarah dalam memutuskan suatu masalah (demokratis), musyawarah dalam memilih ketua kelas, intensif dalam diskusi kelompok, tanya jawab dan berani mengemukakan pendapat di depan kelas, 5) semua siswa mendapat perhatian yang sama dari guru. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih banyak peserta didik yang belum memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta ada beberapa sekolah yang dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila terdapat ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan pada RPP.
- 3) Tahap evaluasi telah dilakukan dengan tes dan non tes. Tes berupa nilai ulangan harian, nilai UTS, nilai UAS, saat diskusi, saat tanya jawab sebagai bentuk evaluasi proses, sedangkan non tes berupa pengamatan sikap dan perilaku sehari-hari sebagai evaluasi hasil.

Secara proses banyak siswa yang belum dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam sebuah wawancara dengan bapak kepala sekolah bapak Drs Ramli.S.Pd tentang kedisiplinan di SMP Negeri 13 Makassar beliau mengatakan :

“Bahwa kedisiplinan di SMP Negeri 13 Makassar sangat di utamakan khususnya pada pelaksanaan Upacara bendera supaya siswa / siswi memaknai upacara bukan sekedar ceremony saja tetap merupakan perwujudan penanaman nilai nilai pancasila” (Wawancara tgl 07 februari 2019 jam 12.00)

b. Faktor Pendukung Dalam Pengembangan Nilai - Nilai Pancasila Pada Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Kota Makassar

Faktor Pendukung Dalam Pengembangan Nilai - Nilai Pancasila Pada Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Kota Makassar yaitu:

1. adanya sarana dan prasana sekolah yang memadai,
2. adanya dukungan kurikulum dan
3. orang tua peserta didik.

SMP Negeri 13 Kota Makassar yang juga merupakan sebagai sekolah faporit di kota Makassar tidak lepas dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berada di SMP Negeri 13 Makassar hal ini terlihat dari daftar sarana dan prasarana yang di jelaskan di atas sehingga mampu menampung ribuan siswa / siswi sehingga hal ini pula lah yang merupakan penunjang kelangsungan proses pembelajaran berjalan dengan baik.

Dalam sebuah wawancara dengan kepala sekolah bapak Drs Ramli.M.Pd tentang sarana dan prasarana sebagai pendukung perwujudan nilai nilai pancasila beliau berkomentar bahwa

“Bahwa kami di SMP Negeri 14 Makassar terus menanamkan nilai nilai gotong royong dan kerjasama dengan pembangunan Kantin sehat yang di mana bentuk pelaksanaan kantin tersebut mulai dari kebersihan dan operasionalnya ikut melibatkan siswa /siswi SMP Negeri 13 Makassar(wawancara tgl 7 Februari 2019 Jam 12.00)

Dari hasil wawancara di atas peneliti berkesimpulan bahwa pelaksanaan nilai luhur bangsa Indonesia dan penanaman nilai nilai paancasila sebagai ideology bangsa dan nilai nilai pancasiila sebagai dasar hukum bangsa Indonesia harus di pupuk dan di mulai dari bangku sekolah sehingga siswa dapat mengimplementasikan nilai nilai pancasila pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara di mulai dari pembiasaan pembiasaan yang bernilai positif yang tentu nya harus di dukung oleh fasilitas , guru dan siswa itu sendiri.

c. Faktor penghambat dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila

Pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar meliputi peserta didik yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, adanya karakter peserta didik yang beraneka ragam serta peserta didik malas membaca serta faktor lingkungan masyarakat sekitar yang melakukan perilaku yang tidak baik. Upaya yang dilakukan guru PPKn untuk mengatasi dan meminimalisir faktor penghambat dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn yaitu menanamkan nilai-nilai karakter, setiap pagi apel pagi, senyum sapa, memberikan contoh teladan, adanya peraturan yang ketat, adanya razia, memberikan sanksi yang tegas bagi peserta didik yang berperilaku negatif.

Hal ini senada dengan yang disampaikan pada kesempatan wawancara oleh ibu Radiawaty.S.Pd sebagai Guru BK Atau Guru Bimbingan dan konselin SMP Negeri 13 Makassar Tentang sanksi Bagi Siswa yang Malas dan Sering Terlambat beliau Mengatakan :

”Bahwa memang ada Siswa memiliki karakter yang beda dengan karakter malas dan sering terlambat tetapi kami terus melakukan pembinaan dengan menyampaikan dengan system pendekatan dan berkomunikasi dengan orang tua siswa” (wawancara tgl 07 Feberuari 2019 jam 10.00)

Pembentukan kompetensi dan karakter yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan kurikulum 2013, ini menjadi peran guru yang sangat penting untuk mempengaruhi siswa untuk mengubah pola pikir, perilaku, membentuk karakter peserta didik dan menjadi teladan yang baik.

d. Nilai Karakter

Dalam Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional (2011: 8), dijelaskan bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu (1)Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri,(8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta TanahAir, (11) Menghargai Prestasi, (12) Bersahabat/komunikatif, (13) Cinta Damai, (15)

Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab (Sumber: Pusat Kurikulum. Pengembangan dan

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10) dalam (Kemendiknas, 2011: 8).

Peneliti menanyakan kepada responden bagaimana dengan penyesuaian materi pembelajaran kaitannya dengan nilai karakter yang bisa dimunculkan. Apakah hanya ketika materi tentang demokrasi saja nilai karakter demokrasi tersebut bisa dimunculkan. Responden menjelaskan bahwa tidak, dalam materi-materi lain tentunya juga bisa dimunculkan. Pertanyaan selanjutnya nilai-nilai karakter tersebut apakah memang sudah mewajibkan bahwa di SMP Negeri 13 Makassar harus memuat nilai-nilai karakter? Responden dalam hal ini bernama bapak akbar tanjung.S.Pd mengatakan bahwa

“Memang sudah menjadi aturannya bahwa harus memunculkan nilai-nilai karakter kedalam silabus dan RPP. Nilai-nilai karakter yang telah dikembangkan dalam pembelajaran.” (...) Beliau mengatakan bahwa ada beberapa nilai yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar. Nilai-nilai tersebut yaitu jujur, tanggung jawab, toleransi, cinta tanah air, gemar membaca. Adalima nilai karakter yang telah dikembangkan dari hasil wawancara tersebut”(wawancara tgl 07 Feberuari 2019 jam 11.00)

Namun dalam pengambilan data ini tidak hanya menggunakan teknik wawancara tetapi juga dengan dokumentasi dalam hal ini yaitu silabus dan RPP yang digunakan oleh bapak/ibu guru PPKn SMP Negeri 13 Makassar. Peneliti mencoba menemukan nilai-nilai yang telah dikembangkan dalam silabus dan RPP yang digunakan ibu/bapak guru PPKn di SMP Negeri 13 Makassar. Nilai-nilai tersebut yaitu pertama untuk kelas VII ada nilai-nilai yang sudah dimasukan kedalam silabus. Nilai nilai tersebut yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, disiplin, jujur, cinta tanah air,demokratis, dan toleransi. Ada delapan nilai yang

telah dikembangkan dalam silabus mata pelajaran PPKn kelas VII aSMP Negeri 13 Makassar yang Wali kelas oleh ibu Nur Rajemi Hasan Tetapi dalam RPP tidak ditemukan bahwa nilai-nilai tersebut dimasukkan kedalam RPP.

Dari nilai-nilai karakter yang telah dikembangkan sudah menunjukkan terpenuhinya nilai-nilai karakter dalam PPKn. Jadi sebagian besar guru PPKn di SMP Negeri 13 Makassar sudah mengembangkan nilai-nilai karakter dengan cukup baik.

4. Pelaksanaan Kurikulum 2013 (K13) Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar

Pelaksanaan Kurikulum 2013 Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar telah dilaksanakan. Dalam prosesnya pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn menempuh tiga tahap sebagai berikut:

a. Perencanaan Pembelajaran

Pada tahap ini guru mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar terlebih dahulu mempersiapkan diri selanjutnya menyiapkan semua perangkat pembelajaran yang terdiri dari 13 item seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, alat dan media pembelajaran seperti LCD atau proyektor, adapun kegiatan diawal pembelajaran guru biasanya mempersiapkan kelas terlebih dahulu agar kelas lebih kondusif , selanjutnya memberikan motivasi kepada para peserta didik, selanjutnya absen maupun apersepsi kepada peserta didik

kemudian menjelaskan tentang KI-KD yang akan di bahas pada setiap pertemuan.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pada proses pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn, guru menerapkan model pembelajaran tertentu yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan, adapun model pembelajaran yang sering digunakan guru dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu model discovery/inquiry learning, dengan model diskusi dimana peserta didik harus meneliti sendiri, mencari dan menggali informasi terkait materi pembelajaran baik secara individu maupun kelompok.

c. Penilaian Hasil Belajar

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn, semua guru bukan hanya guru mata pelajaran PPKn menggunakan sistem penilaian berdasarkan format kurikulum 2013 yaitu pertama adalah penilaian sikap dengan instrumen penilaian yaitu observasi, penilaian diri (self assessment), penilaian teman sebaya dan penilaian jurnal. Kedua yaitu penilaian pengetahuan dengan instrumen penilaian tes dan non tes, observasi terhadap diskusi, tanya jawab dan percakapan serta penugasan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan dengan instrument penilaian yaitu untuk kerja/kinerja/praktik, proyek dan portofolio

5. Hambatan Yang Dialami Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran dan Evaluasi Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar.

Secara umum kendala yang dihadapi guru mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar. Terkait pelaksanaan kurikulum 2013 adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang tidak mudah dan membutuhkan pelatihan khusus, masih banyak kendala atau kesulitan terutama dirasakan oleh guru mata pelajaran PPKn.

Kendala-kendala yang dialami oleh guru terlihat dalam proses pelaksanaannya.

a. Perencanaan Pembelajaran

Kendala yang dihadapi guru dalam perencanaan pembelajaran diantaranya banyak hal yang harus dipersiapkan hanya untuk satu pembelajaran, ditambah lagi harus menggunakan pendekatan saintifik yang dianggap banyak menyita waktu guru. Kesiapan sarana dan prasarana untuk menyambut kurikulum baru yang membutuhkan sedikitnya seperti LCD, buku revisi kurikulum 2013 dan sarana penunjang lainnya di SMP Negeri 13 Makassar

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Kendala yang dialami guru dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu sulit mengubah cara belajar peserta didik dari yang pasif keaktif seperti yang ditekankan dalam kurikulum 2013, kebanyakan peserta didik belum mampu melaksanakan model pembelajaran discovery/inquiry yang menekankan kepada peserta didik untuk mencari dan menyajikan

sendiri informasi yang ditemukan, karena sebelumnya peserta didik telah terbiasa menerima materi pembelajaran yang kebanyakan disampaikan oleh guru mata pelajaran PPKn sementara dalam kurikulum 2013 mengalami perubahan dimana guru hanya sebagai fasilitator atau memonitoring peserta didik,selebihnya peserta didik yang berusaha mencari informasi dari sumber lain.

c. Penilaian Hasil belajar

Kendala yang dialami guru mata pelajaran PPKn dalam penilaian hasil belajar karena terlalu banyaknya penilaian pada kurikulum2013 seperti guru yang masih kesulitan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik dari hasil belajarnya karena terlalu banyak penilaian mulai dari aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.sehingga guru di tuntut agar dapat melakukan penilaian kepaada setiap siswa / siswi SMP Negeri 13 Makassar

6. Upaya Penguatan Kebijakan K13 Yang Dilakukan Oleh Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran Dan Evaluasi Hasil Belajar Mata Pelajaran PPKn Di SMP Negeri 13 Makassar

- a. Secara umum upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar yaitu guru perlu mengikuti pelatihan MGMP tingkat kabupaten kota dan pendampingan kurikulum 2013, sehingga guru bisa mempelajari materi-materi atau komponen kurikulum 2013 yang belum dipahami termasuk didalam nya ada 13 item seperti RPP, Silabus, Prota, Prosem sampai pada teknik penilaian

sesuai kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya disekolah, pembekalan materi yang didapati guru dari pelatihan tersebut yaitu guru bisa menjadi fasilitator yang lebih kreatif dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan dalam kelas. Adapun upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn meliputi beberapa tahap dilihat dari proses pembelajaran:

- b. Perencanaan Pembelajaran Perlu penambahan sarana dan prasarana seperti media pembelajaran disekolah yang diketahui masih minim adanya sebagai penunjang dalam pelaksanaan kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar meliputi Buku pengangan baik untuk siswa maupun guru revisi kurikulum 2013 dan juga masalah LCD yang kurang memadai disekolah.
- c. Pelaksanaan Pembelajaran upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran diantaranya guru tetap membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti yang diketahui bahwa dalam pelaksanaan kurikulum 2013 guru sering menerapkan model pembelajaran discovery learning dimana peserta didik harus meneliti dan mencari informasi terkait materi pembelajaran dan juga siswa harus aktif dalam kegiatan diskusi, namun dalam hal ini guru tidak melepas siswa begitu saja melainkan tetap membimbing dengan cara

menggabungkan metode lama yaitu metode ceramah oleh guru mata pelajaran PPKn sesuai kurikulum 2013. Selain itu guru harus memancing minat dan stimulus peserta didik dengan cara menunjuk salah satu peserta didik untuk berpendapat dalam diskusi dan peserta lain akan menanggapi sehingga peserta didik yang tadinya pasif dalam mengikuti pelajaran, lama kelamaan akan memicu keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran.

- d. Penilaian hasil belajar upaya yang dilakukan guru mata pelajaran PPKn untuk mewujudkan pelaksanaan kurikulum 2013 yang efisien yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar tentang evaluasi kurikulum 2013 mata pelajaran PPKn guru dapat mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) tingkat kabupaten kota untuk membahas mengenai pelaksanaan kurikulum 2013 yang benar bersama-sama dengan guru lain sehingga dapat saling bertukar fikiran maupun ide kesempurnaan evaluasi pembelajaran yang akan dibuat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian.

A. Respon Siswa / Siswi SMP Negeri 13 Terhadap Pembelajaran PPKn

1. Respon Siswa / Siswi SMP 13 Makassar Terhadap Pelajaran PPKn

Menurut Soenarjo, istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap suatu pesan yang dilancarkan oleh komunikator (Soenarjo dan Djoenarsih S. Soenajo, 1983: 25). Ahmad Subandi mengemukakan respon dengan istilah balik

(feedback) yang memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu komunikasi (Ahmad Subandi, 1982:50). Dengan adanya respon yang disampaikan dari komunikan kepada komunikator maka akan menetralsir kesalahan penafsiran dalam sebuah proses komunikasi.

Para ahli dalam menafsirkan respon antara satu dan lainnya berbeda. Tetapi walaupun para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikan tanggapan, kesemuanya memiliki titik kesamaan. **Temuan** Peneliti dilapangan pada saat ini bahwa siswi siswi SMP Negeri 13 Makassar mengikuti dengan pelajaran PPKn ini di karenakan bahwa komunikasi antara guru dan siswa terjalin dengan baik ini di buktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa siswa yang lebih banyak yang antusias mengikuti pelajaran PPKn di karenakan oleh faktor gurunya yang mampu membangun komunikasi dalam memberikan penyajian pelajaran PPKn.

2. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Siswa / Siswi SMP Negeri 13 Makassar Terhadap Pelajaran PPKn

Dalam proses belajar mengajar minat merupakan salah satu faktor dalam memperoleh hasil belajar. Sebab tanpa adanya minat yang tinggi, siswa merasa terpaksa dan terbebani dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, di samping ini proses belajar akan terwujud bila dalam dirinya terdapat keseriusan. Begitu juga kondisi fisiologis berupa kesehatan, semangat dan potensinya yang normal. Akan tetapi semua ini tidak berjalan dengan normal, Berdasarkan **Temuan** peneliti di lapangan

faktor - faktor yang mempengaruhi secara garis besar dibagi dua yaitu Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri anak yaitu sendiri. Seperti kesehatan, rasa aman, kemampuan minat dan sebagainya dan Faktor Exsternal, ialah faktor yang dari luar diri si anak Seperti kebersihan rumah, udara yang panas, lingkungan dan sebagainya

Seperti yang kita ketahui Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib mulai dari SD, SMP dan SMA. Semenjak SD kelas 1 kita sudah mulai diperkenalkan oleh pelajaran PPKn mulai dari pelajaran dasar yang tentunya mudah dipahami seperti pelajaran tenggang rasa, percaya diri, toleransi dan sebagainya. Semakin meningkat tingkat pendidikan maka maka pelajaran pendidikan kewarganegaraan pun semakin rumit karena banyak sekali materinya.

Seorang guru yang ingin mengajar hendaknya menguasai bahan yang akan disajikan. Dengan menguasai bahan yang akan disajikan itu menimbulkan keaktifan bagi guru dalam memberikan materi pelajaran yang di ajarkan.

Temuan peneliti di lapangan bahwa salah satu faktor juga yang mempengaruhi tentang motivasi siswa dalam penerimaan pembelajaran PPKn adalah dengan faktor gurumenurut siswa bahwa guru PPKn di SMP Negeri 13 Makassar sangat menguasai materi dan dapat membuat suasana menjadi nyaman sehingga siswa/siswi dapat dengan mudah berinteraksi dan melakukan diskusi

3. Solusi Solusi Dalam Meningkatkan Minat Siswa/ Siswi SMP Negeri 13 Makassar Terhadap Pelajaran PPKn

Salah satu upaya untuk menciptakan minat belajar siswa adalah motivasi dari orang tua, guru dan lingkungannya. Motivasi sangat mendukung berhasilnya siswa dalam proses belajar mengajar. Semakin guru mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, siswa akan semakin termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Dan yang paling sangat mempengaruhi situasi anak dalam menerima pelajaran adalah faktor lingkungan tentunya dengan lingkungan yang baik di sekolah dan di luar sekolah tentunya akan memberikan nuansa nyaman bagi siswa termasuk maraknya pengedaran narkoba di kalangan atau dilingkungan sekolah dan di luar sekolah. **Temuan** Peneliti di lapangan bahwa pihak sekolah sudah sedini mungkin mensosialisasikan bahaya penggunaan Narkoba bagi pelajar siswa dengan melakukan kerjasama dengan pihak BNN Provinsi Sulawesi selatan yang dilaksanakan di awal semester pelajaran.

Temuan peneliti di lapangan bahwa solusi yang dikembangkan dan diterapkan guru dalam membuat siswa menjadi minat terhadap pelajaran PPKn selain dengan metode ceramah juga dengan melaksanakan tanya jawab dan diskusi sehingga siswa terpancing kreatifitasnya dalam menggali lagi kemampuannya. selain itu guru terus membangun komunikasi yang baik dengan siswa sehingga siswa tidak merasa tegang dalam mengikuti pelajaran PPKn.

Temuan peneliti di lapangan bahwa dengan belajar PPKn siswa akan merasa bosan sehingga guru atas nama akbar tanjung .S.Pd berupaya semaksimal mungkin menciptakan suasana belajar yang nyaman serius tapi santai sehingga anak mudah berfikir dalam diskusi di dalam kelas

B. Penguatan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Negeri 13 Makassar

1. Penerapan Kebijakan Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013, Kurikulum 2013 diterapkan secara bertahap selama 7 tahun sejak aturan itu disahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan perbaikan terhadap Kurikulum 2013. Setiap perbaikan dan pengembangan yang dilakukan pemerintah terhadap kurikulum dari waktu ke waktu bertujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki tiga kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta didik, antara peserta didik dan pendidik, dan antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif, agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian.

Temuan peneliti di lapangan bahwa kurikulum 2013 (K13) di SMP Negeri 13 Makassar terus di kembangkan walupun masih setengah masih mempergunakan metode KTSP 2006 dengan masuhnya Guru PPkn menggunakan metode ceramah, sehingga Tujuan penggunaan model pembelajaran sebagai strategi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya baik berupa informasi, gagasan, keterampilan nilai dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih, bijaksana dan membangun keterampilan sosial serta komitmen.

2. Pemahaman Guru PPkn Tentang Kebijakan Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar

Sistem Pendidikan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, sebagai usaha perbaikan mutu pendidikan (Indriani, 2014). Sejak tahun 2013 telah dilaksanakan Kurikulum baru oleh pemerintah yang diberi nama Kurikulum 2013 Proses implementasi Kurikulum 2013 dimulai dengan disiapkan Buku Teks Pelajaran Siswa dan Buku Pedoman bagi Guru, diadakan pelatihan guru, pelatihan kepala sekolah dan pelatihan pengawas, pendampingan serta pembelajaran di kelas. **Temuan** penelitian dilapangan pada umumnya guru sudah paham tentang fungsi Kurikulum 2013 tetapi kebanyakan Guru masih banyak beranggapan bahwa kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas cukup memberikan bahan dan siswa sendiri lah yang mencari solusinya, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru di tambah lagi sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional

dengan cara memberikan metode ceramah sehingga siswa hanya mendengarkan saja, disamping itu pula pada siswa yang di tuntut untuk melakukan Tingkat keaktifan belum merata di karenakan tingkat kemampuan siswa yang berbeda beda.

3. Nilai Nilai Yang Telah Dikembangkan Dalam Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar

Banyak nilai yang ditanamkan pada diri siswa dalam PPKn untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu nilai yang penting ditanamkan pada siswa yaitu nilai moral. PPKn mengajarkan nilai moral pada siswa. Nilai moral ini diajarkan guru kepada siswanya tentang bagaimana bersikap dalam masyarakat yaitu antara lain: saling membantu, tolong menolong, dan sopan santun dalam bertindak. Misalnya pada siswa, pemberian materi lebih ditekankan pada nilai-nilai moral yaitu bagaimana siswa bersikap dan bertindak. Siswa ditekankan pada soal-soal tentang asas gotong royong dalam masyarakat, tolong menolong antar sesama teman dan saling mengasihi, menjenguk teman yang sakit dan sopan santun dalam berbicara dan bertindak. Adapun tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan yaitu: pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kedua, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Keempat, berinteraksi

dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Temuan Peneliti di lapangan Tahap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn dengan memberikan pengarah dan bimbingan sebagai bentuk komitmen dalam mendidik peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti: 1) menanamkan nilai-nilai religiusitas misalnya shalat berjamaah, dan adanya koperasi untuk melatih siswa akan nilai kejujuran, 2) mengikuti organisasi PMR, Remas (Remaja Masjid) Pramuka dan OSIS dan organisasi lainnya, menjenguk teman yang sakit, saling tolong menolong dan menghargai sesama manusia, 3) upacara bendera yang sifatnya wajib sehingga tertanam sikap disiplin siswa, kerja bakti yang di aksanakan pada hari jumat sehingga terbentuk rasa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Temuan peneliti di lapangan bahwa salah satu tindakan atau program yang dibuat pihak sekolah dalam menanamkan nilai nilai pancasila dan kewarganegaraan yaitu di buat nya kantin sehat yang di mana operasional dan kebersihannya dari kantin tersebut turut melibatkan siswa dan pengawasan dari pihak guru terkait.

4. Pelaksanaan K13 Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh guru Mata Pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) **Temuan** Peneliti di lapangan bahwa proses pelaksanaan kurikulum 2013 dalam proses pelaksanaannya sudah

menempuh tiga tahap itu (1) tahap perencanaan, (2) Tahap Pelaksanaan pembelajaran, dan (3) Tahap penilaian hasil belajar

5. Hambatan Guru Mata Pelajaran PPKn

Secara umum pelaksanaan proses pelaksanaan kurikulum 2013 tidak mudah membalik telapak tangan karena akan membutuhkan pelatihan khusus sedangkan pemerintah tidak melakukan pelatihan untuk guru secara merata kepada semua terutama di rasakan oleh guru mata pelajaran PPKn. **Temuan** peneliti di lapangan bahwa sulit mengubah perilaku siswa yang dari pasif ke kreatif seperti yang di tekankan pada kurikulum 2013 kebanyakan siswa belum bisa untuk mencari sendiri atau menyajikan sendiri informasi yang di tentukan di karekan siswa ddalam menerima materi pelajaran yang kebanyakan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. jadi siswa tidak bersifat sebagai pusat atau centre (*student centre*) seperti apa yang di tekankan oleh kurikulum 2013.

6. Upaya Penguatan Kurikulum 2013

Mengingat kurilum 2013 terus menerus di lakukan perbaikin mulai dari persiapan dan pelaksanaan nya tentu banak kendala kendala yang di hadapi oleh para guru mata pelajaran. Upaya penguatan kurikulum 2013 untuk mengatasi kendala kendala yang di hadapi oleh guru mata pelajaran terus di lakukan secara bertahap dengan Melakukan pelatihan pelatihan kepada guru secara bergiliran dalam membuat Rencana Persiapan pembelajaran. **Temuan** peneliti di lapangan Pihak SMP selalu mengikutkan guru gurunya pada pelatihan pembuatan RPP atau rencana persiapan

pembelajaran yang dii lakukan KKG atau kelompok Kerja Guru di kecamatan masing masing sehingga penerapan kurikulum 2013 kepada guru perlahan memberikan pemahaman tentang perubahan pola yang lama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengembangan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 13 Makassar, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pengembangan pembelajaran PPKn dalam mendorong pembentukan karakter siswa dapat dilihat melalui tiga proses penting yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran melalui RPP, pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai pendekatan, dan evaluasi pembelajaran yang mencakup evaluasi proses dan hasil. Karakter peserta didik yang dapat terlihat dalam kegiatan pengembangan pembelajaran PPKn di kelas yaitu: sikap religius, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, sikap kritis, kerjasama, dan sikap saling menghormati dan menghargai.

1. Respon atau sikap dari siswa dan siswi SMP Negeri 13 Makassar menerima baik dan senang terhadap mata pelajaran PPKn hal ini disebabkan karena guru mata pelajaran PPKn menguasai materi tersebut dan menyajikan dengan baik dan membuat rasa situasi menjadi nyaman sehingga siswa dan siswi mampu berfikir kritis dan mampu mengeksplorasi diri sehingga siswa dan siswi tidak di bawah tekanan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara garis besar dibagi dua yaitu Faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dalam diri anak yaitu sendiri. Seperti kesehatan, rasa aman, kemampuan minat dan sebagainya dan

Faktor Exsternal, ialah faktor yang dari luar diri si anak Seperti kebersihan rumah, udara yang panas, lingkungan dan sebagainya

3. Solusisolusi yang terus dikembangkan dan diterapkan guru dalam membuat siswa menjadi minat terhadap pelajaran PPKn selain dengan metode ceramah juga dengan melaksanakan tanya jawab dan diskusi sehingga siswa terpancing kreatifitasnya dalam menggali lagi kemampuannya.selain itu guru terus membangun komunikasi yang baik dengan siswa sehingga siswa tidak merasa tegang dalam mengikuti pelajaran PPKn.
4. Penerapan kurikulum 2013 (K13) di SMP Negeri 13 Makassar terus di kembangkan walupun belum maksimal karena setengah masih mempergunakan metode KTSP 2006 sehingga Guru PPkn masih menggunakan metode ceramah,sehingga Tujuan penggunaan model pembelajaran sebagai strategi bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya baik berupa informasi, gagasan, keterampilan nilai dan cara-cara berpikir dalam meningkatkan kapasitas berpikir secara jernih, bijaksana dan membangun keterampilan sosial serta komitmen.
5. Pada umumnya guru sudah paham tentang fungsi Kurikulum 2013 tetapi kebanyakan Guru masih banyak beranggapan bahwa kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas cukup memberikan bahan dan siswa sendiri lah yang mencari solusinya, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru.

6. Tahap pelaksanaan pengembangan nilai-nilai pancasila dalam pembelajaran PPKn dengan memberikan pengarahan dan bimbingan sebagai bentuk komitmen dalam mendidik peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti: 1) menanamkan nilai-nilai religiusitas misalnya shalat berjamaah, dan adanya koperasi untuk melatih siswa akan nilai kejujuran, 2) mengikuti organisasi PMR, Remas (Remaja Mesjid), Pramuka dan OSIS dan organisasi lainnya, menjenguk teman yang sakit, saling tolong menolong dan menghargai sesama manusia, 3) upacara bendera yang sifatnya wajib sehingga tertanam sikap disiplin siswa, kerja bakti yang di aksanakan pada hari jumat sehingga terbentuk rasa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya salah satu wujud Pihak sekolah untuk memupuk kebersamaan dengan membuat kan Kantin sehat untuk melatih siswa dalam manajemen operasional kantin.
7. Bahwa proses pelaksanaan kurikulum 2013 dalam proses pelaksanaannya sudah menempuh tiga tahap itu (1) tahap perencanaan, (2) Tahap Pelaksanaan pembelajaran, dan (3) Tahap penilaian hasil belajar
8. Hambatan yang paling utama dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah bahwa sulit mengubah perilaku siswa yang dari pasif ke kreatif seperti yang di tekankan pada kurikulum 2013
9. Salah satu penguatan kurikulum 2013 dari Pihak SMP yaitu selalu mengikutkan guru gurunya pada pelatihan pembuatan RPP atau rencana persiapan pembelajaran yang di lakukan KKG atau kelompok Kerja Guru di kecamatan masing masing sehingga penerapan kurikulum 2013 kepada

guru perlahan memberikan pemahaman tentang perubahan pola yang lama.

Upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan pengembangan pembelajaran PPKn dalam mendorong pembentukan karakter pada siswa ialah:

- 1) Memberikan penugasan dengan memberikan aturan main pada saat waktu pembelajaran tidak bisa dimanfaatkan secara penuh;
- 2) Penggunaan metode yang variatif guna menarik minat/perhatian;
- 3) Melakukan dialog dan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak disiplin;
- 4) memberikan batasan dalam memilih kegiatan dan penyediaan sarpras yang memadai.

Faktor pendukung dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar yaitu:

- a) adanya sarana dan prasana sekolah yang memadai,
- b) adanya dukungan kurikulum dan
- c) orang tua peserta didik.

Faktor penghambat dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar meliputi peserta didik yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, adanya karakter peserta didik yang beraneka ragam serta peserta didik malas membaca serta faktor lingkungan masyarakat sekitar yang melakukan perilaku yang tidak baik.

Upaya yang dilakukan guru PPKn untuk mengatasi dan meminimalisir faktor penghambat dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn yaitu menanamkan nilai-nilai karakter, setiap pagi apel pagi, senyum sapa, memberikan contoh teladan, adanya peraturan yang ketat, adanya razia, memberikan sanksi yang tegas bagi peserta didik yang berperilaku negatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tentang “Penguatan Kebijakan Pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar” maka peneliti memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak tertentu.

A. Pihak Sekolah SMP Negeri 13 Makassar

1. Hendaknya pihak Sekolah SMP Negeri 13 Makassar menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi siswa khususnya sumber kepustakaan yang berkaitan dengan bidang PPKn khususnya buku induk yang dikelola dengan baik agar guru maupun siswa mampu memahami pembelajaran dengan baik.
2. Hendaknya pihak Sekolah SMP Negeri 13 Makassar perlu menciptakan kultur lingkungan yang kondusif agar mampu membangun karakter peserta didik yang kuat karena karakter sesungguhnya lebih penting dari pada kecerdasan semata yang tidak diimbangi dengan nilai-nilai karakter peserta didik.

B. Pihak Guru Pengajar SMP Negeri 13 Makassar

1. Guru sebagai pendamping, teladan, pengampu maupun fasilitator dalam kegiatan pembelajaran PPKn hendaknya melakukan pengembangan diri khususnya terkait bidang akademik yang ditekuninya sehingga mampu memberikan wawasan yang kontekstual dan faktual.
2. Pengembangan pembelajaran PPKn yang dilakukan oleh guru hendaknya perlu didukung oleh perencanaan pembelajaran yang baik serta variasi pembelajaran yang dinamis guna mendorong minat dan partisipasi peserta didik.
3. Hendaknya pengembangan nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi komitmen guru PPKn di SMP Negeri 13 Makassar dalam menjaga budaya luhur bangsa Indonesia.
4. Hendaknya guru PPKn di SMP Negeri 13 Makassar dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengembangan nilai-nilai Pancasila.
5. Hendaknya faktor penghambat yang ada dapat diminimalisir agar tidak menjadi faktor gagalnya pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar seperti kurangnya kesadaran peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dapat diminimalisir dengan cara mengajarkan pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi generasi bangsa dan memberikan contoh keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti saling menghormati

kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, Mengembangkan sikap tenggang rasa, Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta menghormati hak-hak orang lain.

6. Terus memberikan pemahaman akan arti pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa sehingga siswa dan siswi mengenal bentuk perjuangan pahlawan kita dalam mempertahankan ideologi bangsa Indonesia.
7. Terus menciptakan rasa nyaman kepada siswa dan siswi sehingga penerimaan siswa dan siswi terhadap mata pelajaran dapat berjalan baik sehingga siswa dapat berfikir kritis dan menemukan ide-ide kreatif sehingga dapat dengan mudah menguasai mata pelajaran yang sudah diberikan.
8. Terkhusus untuk guru BK atau guru bimbingan dan konseling agar melakukan pendekatan persuasif kepada siswa/siswi yang bermasalah baik itu masalahnya disebabkan dari faktor internal maupun eksternal dan tetap memupuk rasa kekeluargaan antara siswa dan guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fauzi et al.,(1981). *Pancasila Ditinjau Dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan UNIBRAW, Malang
- Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat, (1991) *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta,.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daroeso, B. (1989). *Dasar dan konsep pendidikan moral pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dewi, R. I., Soemiarno, S., Poerbasari, A. S., & Meinarno, E. A. (2013). *Mata kuliah pengembangan kepribadian terintegrasi A: Bangsa, Negara, dan Pancasila*. Depok: Universitas Indonesia. Penggunaan internal.
- Hayat (2017) *Manajemen Pelayanan Publik* .PT Raja Grafindo Persada,Depok
- Hesbani Pasalong (2017) *Teori Administrasi Publik* ,Alfabet,Bandung
- Hidayat. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan keagamaan. Dalam aktualisasi nilai- nilai Pancasila dalam membangun karakter warga negara*. Penyunting: Dasim Budimansyah dan Prayoga Bestari. Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI. Bandung.
- Juneman., Putra, F., Meinarno, EA. (2012).*Kompatibilitas keutamaan karakter dengan nilai-nilai Pancasila: Perspektif kontrak psikologis dan kontrak sosial*. Prosiding SNaPP 2012. Bandung.
- Kaelan. (2012). *Problem epistimologis empat pilar berbangsa dan bernegara*. Yogyakarta. Penerbit Paradigma Yogyakarta.
- Latif, Y. (2013) *Soekarno sebagai penggali Pancasila*. Prisma Vol. 32, No. 2 & 3,. Hlm. 17- 42.
- Maftuh, B.(2008). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui*

Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Educationist, 2(2), 134-144.

Mashoedi, SF., Mahardini, G., Carolina, C. (2012). *Nilai Pancasila dan Kewargaan Indonesia: Adakah Hubungannya?* Prosiding Seminar Nasional Psikologi Universitas Paramadina. Jakarta, 6 September 2012

Meinarno, E. A., Widiyanto, B., & Halida, R. (2015). *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Ed. 3. Jakarta. Salemba Humanika.

Meinarno, EA., Suwartono, C. (2013). *Identitas etnis, Pancasila, dan identitas nasional: Remaja Indonesia menatap masa depan. Dalam buku Menongkah arus globalisasi: Isu-isu psikologi di Malaysia dan Indonesia*. Penyunting Jas Laile Suzana, Yahaya Mahamood dan Zahari Ishak. Diterbitkan oleh Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya 50603 Kuala Lumpur.

Saptono. (2011). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sarbaini. (2011). *Pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter dalam upaya rekonstruksi dan reaktualisasi patriotisme warga negara. Dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangunkarakter warga negara*. Penyunting: Dasim Budimansyah dan Prayoga Bestari. Widya Aksara Press dan Laboratorium PKn UPI. Bandung.

Siagian P.Sondang (1979) *filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta

Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke 19 Oktober 2013: Alfabeta, Bandung

Suwartono, C., Meinarno, EA. (2012) *Value orientation scale: The validation of the Pancasila scale*. *Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia*. Vol. 1, No. 3,

Jurnal Ilmiah

Abidinsyah. (2011). "Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Membangun Peradaban Bangsa Yang Bermartabat". *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, Februari 2011 (Vol. 3 Nomor 1). Hlm. 1-8.

Afifuddin & Saebani, Beni Ahmad. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bandung: Pustaka Setia. Arwiyah, M. Yahya, et. al. (2013).

Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis. Jakarta: Erlangga. Siswoyo, Dwi, et. al. (2008).

Educating for Character. New York: Bantam Book. Diterjemahkan oleh Lita S. Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik. Bandung: Nusa Media. et al. (2007).

Moleong, J. Lexy. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi revisi.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi Strategi dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara. 2017

Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Koesoema A. Doni (2007).

Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global. Jakarta: Grasindo. Lickona, Thomas. (2013).

Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: UNY Press. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78). Winarno. (2013).

Penilaian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Diktat Kuliah). Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY. Murdiono, Mukhamad. (2012).

Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Portofolio. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Muslich, Masnur. (2011).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Permendikbud No. 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jakarta tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jakarta tanggal 9 November 2001.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN 2003 No. 78, TLN No. 4301).

Pasal 37 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN 2004 No. 53, TLN No. 4389).


LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Ijin Penelitian dari Pihak SMP Negeri 13 Makassar

	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 13 MAKASSAR	
Jl. Tamalate VI No.2 Perumnas Makassar Tlp. 0411-868415 Makassar		
<u>SURAT KETERANGAN</u>		
Nomor : 800/044/SMPN.13/II/2019		
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 13 Makassar menerangkan bahwa :		
Nama	:	Sirajuddin Emba
NIM	:	4617103011
Pekerjaan	:	Mahasiswa (S2) Universitas Bosowa Makassar
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan penelitian pada SMP Negeri 13 Makassar pada tanggal 25 Januari - 20 Februari 2019, untuk penyusunan Tesis dengan judul :		
<i>" Penguatan Kebijakan Pembelajaran Sekolah Menengah Pertama Di Kota Makassar "</i>		
Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 10571/S.01/PTSP/2019, tanggal 25 Januari 2019 perihal izin penelitian.		
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Makassar, 20 Februari 2019		
a.n. Kepala SMP Negeri 13 Makassar Wakil Kepala Sekolah		
		
Drs. Sompot Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 19641214 1990021002		

2. Ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan

1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 0 7 6 6


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10571/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar Nomor : 025/B.03/PPs/Unibos/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : SIRAJUDDIN EMBA
Nomor Pokok : 4617103011
Program Studi : Adm. Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :
" **PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MAKASSAR** "

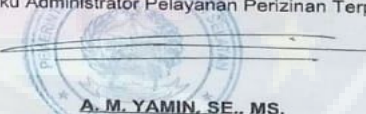
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **25 Januari s/d 25 Maret 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 25 Januari 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar di Makassar,
2. *Portinggal*.

SIMAP PTSP 26-01-2019

 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90222 

3. Hasil Wawancara Mendalam

Mengenai : Penguatan Kebijakan Pembelajaran PPKn SMP Negeri 13
Makassar

Pengantar,

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan segala kerendahan hati kepada Bapak/ibu/saudara/saudari agar kiranya berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan peneliti sesuai dengan pemahaman ,pengalaman dan pengamatan Bapak/ibu/saudara/saudari tentang kebijakan penguatan pembelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar.

Dengan segala hormat peneliti mengucapkan terimakasih telah menjawab pertanyaan ini :

1. Bagaimana Respon,tanggapan dan sikap saudara mengenai mata pelajaran PPKn yang di terapkan di SMP Negeri 13 Makassar.
2. Bagaiamana komentar bapak/ibu/saudara/saudari tentang peranan guru dalam memberikan atau menyajikan mata pelajaran PPKn.
3. Apakah saudara menyukai atau senang dengan mata pelajaran PPKn di karenakan karena faktor gurunya
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/saudara/saudari tentang penyajian materi dari guru mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 13 Makassar
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/saudara/saudari tentang penggunaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri 13 Makassar.
6. Bagaiamana tanggapan bapak/ibu/saudara/saudari tentang kedisiplinan siswa / siswi di SMP Negeri 13 Makassar

7. Bagaimana cara bapak/ibu/saudara/saudari mengatasi anak atau siswa / siswi yang malas.
8. Bagaimana cara bapak/ibu/saudara/saudari memotivasi anak atau siswa agar menyukai mata pelajaran PPKn dan melatih anak mengamalkan nilai nilai pancasila
9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/saudara/saudari tentang peranan sarana dan prasarana sebagai penunjang nilai nilai pancasila di SMP NEgeri 13 Makassar
10. Bagaimana pemahaman bapak/ibu/saudara/saudari tentang penerapan dan pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP Negeri 13 Makassar
11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/saudara/saudari tentang penerapan mata pelajaran PPKn yang sesuai dengan Kurikulum 2013.
12. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/saudara/saudari tentang pencegahan siswa siswi agar terhindar pengaruh dari lingkungan yang dapat mempengaruhi minat anak untuk belajar.
13. Bagaimana tanggapan dan tindakan bapak/ibu/saudara/saudari dalam memberikan bimbingan kepada anak yang bermasalah.

4. Dokumentasi Kegiatan

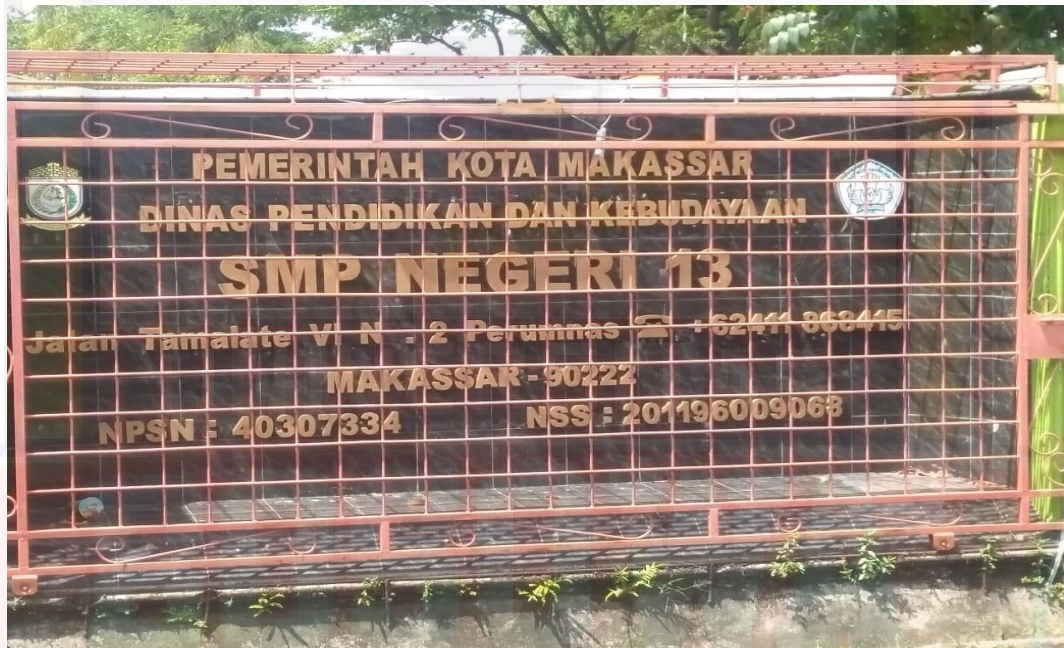
KANTIN SISWA



SUASANA SMP NEGERI 13 MAKASSAR



PAPAN SEKOLAH
SMP NEGERI 13 MAKASSAR



TAMPAK DEPAN
SMP NEGERI 13 MKS



**PERTEMUAN SERAH TERIMA SURAT PERMOHONAN
PENELITIAN DGN KEPALA SEKOLAH**



**WAWANCARA DAN DISKUSI DGN KEPALA SEKOLAH
SMP NEGERI 13 MAKASSAR**



WAWANCARA DENGAN GURU MAPEL PPKn
SMP NEGERI 13 MAKASSAR



PENYEBARAN LEMBAR ANGKET KE PESERTA DIDIK
SMP NEGERI 13 MAKASSAR



PROSES PENGISIAN LEMBAR ANGGKET OLEH PESERTA DIDIK

